



2023



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)



PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan taufik, rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dapat kami selesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada Pasal 22 menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyelenggaraan SAKIP dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pertanggungjelasan (akuntabilitas) kinerja, berupa informasi kinerja berdasarkan perencanaan kinerja strategis dan perencanaan kinerja tahunan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di awal tahun. Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja akan digunakan sebagai bahan evaluasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Hasil pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam LKjIP ini tidak terlepas dari kerja sama dan kerja keras dari semua pihak terkait yakni aparatur Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasi dan pengawasannya. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan partisipasinya dalam penyusunan LKjIP Kabupaten Banyumas Tahun 2023 ini.

Purwokerto, 27 Maret 2024
Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANDUNG CAHYO SAPUTRO, S.STP., M.Si

PERNYATAAN REVIU



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45B Purwokerto 53114
Telp. (0281) 630700 Faks. (0281) 643789 Email : inspektorat@banyumaskab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Purwokerto, 22 Maret 2024

Inspektur Daerah
Kabupaten Banyumas

Diko Setyono, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 197802221990011002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2023 atas perencanaan kinerja sebanyak 12 indikator kinerja, mencapai kinerja dengan predikat “sangat tinggi” yaitu dengan capaian 176,84% (seratus tujuh puluh enam koma sembilan puluh lima persen).

Dari 12 (dua belas) indikator kinerja utama, 4 (empat) indikator kinerja utama belum berhasil mencapai target, yaitu (1) Persentase Penduduk Miskin, (2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), (3) Persentase Kinerja Infrastruktur, (4) Angka Kriminalitas. Namun demikian untuk pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Banyumas masih diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan 8 (delapan) efisien karena indikator kinerja dapat dicapai sebesar 100% atau lebih, dan persentase penyerapan anggaran kurang dari 100%.

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing tujuan dan indikator tujuan telah dianalisis, yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja berdasar target kinerja, membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun lalu, serta membandingkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten sekitar serta dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. Laporan ini menyajikan pula uraian program beserta anggaran dan realisasi anggaran pada masing-masing tujuan, dan stategi yang diambil Pemerintah Kabupaten Banyums dalam mencapai tujuan atau indikator kinerja.

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan, terdapat efisiensi sebesar Rp. 181.543.008.959,00. Efisiensi diperoleh dari efisiensi kegiatan, hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa, hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa menggunakan *e-Puchasing*, tender dan non tender.

Rekomendasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas atas evaluasi penyelenggaraan SAKIP Tahun 2023, telah ditindaklanjuti. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 yang telah disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memperoleh predikat “A”, nilai 80,53. Adapun perkembangan hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai tahun 2017-2023 adalah sebagai berikut:

	Komponen Yang Dinilai	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a.	Perencanaan Kinerja	20,56	22,78	23,89	23,89	24,00	25,20	25,41
b.	Pengukuran Kinerja	12,72	18,66	19,38	19,99	20,23	24,33	25,09
c.	Pelaporan Kinerja	8,89	10,44	10,73	10,73	11,13	11,63	12,33
d.	Evaluasi Internal	6,14	6,40	7,13	7,14	7,75	17,30	17,71
e.	Capaian Kinerja	11,91	12,66	12,71	13,21	13,36		
	Nilai Hasil Evaluasi	53,65	60,22	70,95	73,84	76,47	78,46	80,53
	Kenaikan	5,59	6,57	10,73	2,89	2,63	1,99	2,07
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	CC	B	BB	BB	BB	BB	A

Akhirnya, semoga LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banyumas. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas bersama dengan *stakeholder* yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi menjadikan ***Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri.***

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Pernyataan Reviu	ii	
Ikhtisar Eksekutif	iii	
Daftar Isi	v	
Daftar Tabel	vii	
Daftar Grafik	ix	
Daftar Gambar	xi	
BAB I	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Gambaran Umum Kabupaten Banyumas	2
1.	Kondisi Geografis	2
2.	Luas Wilayah	3
3.	Topografi	3
4.	Kondisi Demografi	4
C.	Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	4
D.	Perangkat Daerah	6
E.	Sumber Daya Aparatur	9
F.	Sumber Daya Keuangan	10
G.	Isu-isu Strategis	11
1.	Kualitas Sumber Daya Manusia	12
2.	Ketersediaan Infrastruktur	13
3.	Pengembangan Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	13
4.	Kemiskinan dan Pengangguran	14
5.	Pertanian mendukung Kedaulatan Pangan	15
6.	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	15
7.	Tata Kelola Pemerintahan	16
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	18
A.	Rencana Strategis	18
1.	Visi	18
2.	Misi	20
3.	Tujuan dan Sasaran	21
B.	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	23
C.	Rencana Anggaran Tahun 2023	25
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	27
A.	Analisis Capaian Kinerja Tujuan	30
1.	Tujuan 1 : Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	30
2.	Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas SDM Terutama Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat	37
3.	Tujuan 3 : Meningkatkan Pembangunan yang Berkeadilan	51
4.	Tujuan 4 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dengan Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dan Non Pertanian	58
5.	Tujuan 5 : Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Sektor Agribisnis	66
6.	Tujuan 6 : Perwujudan Pembangunan Kawasan Industri dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan	72

	untuk Perluasan Kesempatan Kerja	
7.	Tujuan 7 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat	87
8.	Tujuan 8 : Menumbuhkan dan Mengembangkan Daya Tarik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	98
9.	Tujuan 9 : Meningkatkan Aktualisasi Nilai-nilai Budaya, Agama dan Kebangsaan dalam Kehidupan Masyarakat	102
B.	Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	105
1.	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Kinerja	108
2.	Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa	111
C.	Penghargaan Tahun 2023	112
BAB IV	PENUTUP	115
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	PNS berdasarkan Golongan	9
Tabel 1.2.	PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan	9
Tabel 1.3.	PNS berdasarkan Jabatan	10
Tabel 1.4.	Komposisi APBD Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023	11
Tabel 2.1.	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023	24
Tabel 2.2.	Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023	26
Tabel 3.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	27
Tabel 3.2.	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023	28
Tabel 3.3.	Predikat Kinerja Tahun 2023	30
Tabel 3.4.	Capaian Kinerja Tujuan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Tahun 2023	32
Tabel 3.5.	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Target Nasional Tahun 2023	33
Tabel 3.6.	Rincian Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023	34
Tabel 3.7.	Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Kualitas SDM Terutama Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2023	37
Tabel 3.8.	Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023	38
Tabel 3.9.	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Banyumas Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023	40
Tabel 3.10.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Banyumas Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023	42
Tabel 3.11.	Umur Harapan Hidup Kabupaten Banyumas Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023	45
Tabel 3.12.	Pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Banyumas Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 (ribu rupiah)	49
Tabel 3.13.	Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Pembangunan yang Berkeadilan Tahun 2023	52
Tabel 3.14.	Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas dari Tahun 2019-2023	53
Tabel 3.15.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023	54
Tabel 3.16.	Capaian Kinerja capaian Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023	59
Tabel 3.17.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022	60
Tabel 3.18.	Persentase Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2022 (%)	61
Tabel 3.19.	Capaian Kinerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Tahun 2022	63
Tabel 3.20.	PDRB Perkapita Kabupaten Banyumas Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022 (juta rupiah)	64
Tabel 3.21.	Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Sektor Agribisnis Tahun 2023	66
Tabel 3.22.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Banyumas Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional (Indeks	68

	Ketahanan Pangan Global/GFSI) Tahun 2022	
Tabel 3.23.	Capaian Kinerja Tujuan Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Strategis yang Berwawasan Lingkungan untuk Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2023	73
Tabel 3.24.	Nilai Investasi di Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023	74
Tabel 3.25.	Pertumbuhan nilai investasi Kabupaten Banyumas Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023	75
Tabel 3.26.	Jumlah Realisasi Investasi berdasarkan sektor Tahun 2023	76
Tabel 3.27.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyumas Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023	79
Tabel 3.28.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banyumas Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023	84
Tabel 3.29.	Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2023	87
Tabel 3.30.	Kondisi Infrastruktur Jalan Kabupaten Banyumas Tahun 2023	88
Tabel 3.31.	Panjang Jalan Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023	89
Tabel 3.32.	Kondisi infrastruktur irigasi Kabupaten Banyumas pada Tahun 2023	90
Tabel 3.33.	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dan Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2019-2023	92
Tabel 3.34.	Perkembangan Rasio Rumah Layak Huni dan Lingkungan Kumuh Perkotaan Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023	93
Tabel 3.35.	Capaian Kinerja Tujuan Menumbuhkan dan Mengembangkan Daya Tarik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2023	98
Tabel 3.36.	Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023	99
Tabel 3.37.	Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Aktualisasi Nilai-nilai Budaya, Agama dan Kebangsaan dalam Kehidupan Masyarakat Tahun 2023	103
Tabel 3.38.	Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 (Sebelum Audit BPK RI)	106
Tabel 3.39.	Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyumas per tujuan/sasaran strategis Tahun 2023	106
Tabel 3.40.	Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Tujuan/Sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023	108
Tabel 3. 41.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	110
Tabel 3.42.	Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2023	111
Tabel 3.43.	Pelaksanaan PBJ melalui Elektronik tahun 2023	112
Tabel 3.44.	Daftar Penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023	113
Tabel 4.1.	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023	97

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja adalah pilar penting terwujudnya *Good public governance (GPG)* instansi pemerintahan. *Good public governance* tercapai melalui serangkaian pemenuhan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan. Pelaporan kinerja adalah salah satu tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan menjadi bagian proses penting pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan efektif. Pelaporan Kinerja menjadi tahap ke-4 (empat) dalam siklus SAKIP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Setiap instansi dan unit kerja pemerintah dan pemerintah daerah harus mulai menerapkan siklus tersebut sebagai bagian dari pemenuhan akuntabilitas kinerja. Peraturan Presiden ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden tentang SAKIP ini kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Petunjuk Teknis tentang mekanisme dan substansi penyusunan pelaporan kinerja yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja dengan fokus pada pertanggungjawaban capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Kinerja ini, seluruh Instansi

Pemerintah wajib menyampaikan keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 sebagai dokumen perencanaan strategis daerah. Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Banyumas secara substansi digunakan untuk mengukur capaian target kinerja sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Banyumas Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja atas pelaksanaan anggaran pada tahun 2023.

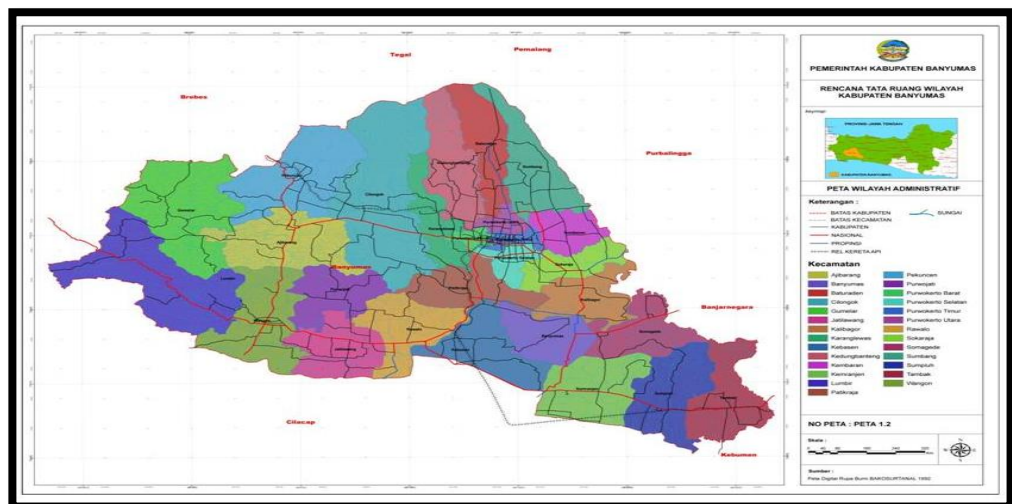
B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Banyumas merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 108 meter diatas permukaan laut, terletak antara $7^{\circ} 15' 05'' - 7^{\circ} 37' 10''$ Lintang Selatan dan antara $108^{\circ} 39' 17'' - 109^{\circ} 27' 15''$ Bujur Timur.

Gambar 1.1.

Peta Kabupaten Banyumas



Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan, 301 desa dan 30 kelurahan. Secara administratif, Kabupaten Banyumas berbatasan dengan wilayah kabupaten yang lain yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Cilacap.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.

2. Luas Wilayah

Secara administratif Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan, 301 Desa, dan 30 Kelurahan. Kabupaten Banyumas memiliki total luas wilayah 132.759 Ha atau sekitar 4,08% dari luas wilayah Jawa Tengah (3.254 juta Ha). Dari 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas, wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Cilongok yang meliputi 7,93% luas Kabupaten Banyumas atau sekitar 10.534 Ha, dan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Purwokerto Barat yaitu 0,56% luas Kabupaten Banyumas atau sekitar 740 Ha.

Dari luas wilayah Kabupaten Banyumas tersebut terbagi menjadi lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Luas penggunaan lahan pertanian adalah 100.712 Ha dan luas penggunaan lahan pertanian bukan sawah sebesar 32.774 Ha.

3. Topografi

Wilayah Kabupaten Banyumas sebagian besar berada pada ketinggian 0-500 mdpl yaitu seluas 121.729,06 Ha. Wilayah Kabupaten Banyumas berdasarkan bentuk bentang alam dan penyebaran geografisnya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu : 1) pegunungan di sebelah utara (lereng Gunung Slamet) dan daerah pegunungan Serayu Selatan; 2) dataran rendah di antara lereng Gunung Slamet dan pegunungan Serayu Selatan; dan 3) dataran rendah di sebelah selatan pegunungan Serayu Selatan.

Daerah dataran potensial sebagai kawasan budidaya, sedangkan daerah perbukitan dengan faktor pembatas kemiringan dan ketinggian lahan diarahkan untuk kawasan konservasi. Wilayah Kabupaten Banyumas

memiliki topografi yang kompleks, kondisi topografi di wilayah Kabupaten Banyumas ditunjukkan dengan kondisi ketinggian lahan dan kemiringan lahan.

4. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Banyumas pada akhir Tahun 2023 sebesar 1.857.211 jiwa yang terdiri dari 936.332 laki-laki dan 920.879 perempuan. Sebaran penduduk di Kabupaten Banyumas masih belum merata. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Cilongok sebanyak 133.740 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Purwojati sebanyak 40.234 jiwa.

Dengan luas wilayah Kabupaten Banyumas 1.327,59 kilometer persegi dan jumlah penduduk sebanyak 1.857.211 jiwa, maka rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas pada Tahun 2023 adalah 1398,93 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Purwokerto Barat yaitu 7222,57 jiwa/km², dan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Lumbir yaitu 518,05 jiwa/km². Kepadatan penduduk di Kabupaten Banyumas masih terpusat di 4 kecamatan pada kawasan perkotaan Purwokerto yaitu Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kecamatan Purwokerto Timur. Pemusatan penduduk di kawasan perkotaan perlu didukung dengan penyediaan permukiman dengan infrastruktur yang memadai untuk mencegah timbulnya permukiman liar dan permukiman kumuh. Di sisi lain peningkatan jumlah penduduk juga perlu dikendalikan karena keterbatasan daya dukung lingkungan kawasan perkotaan.

C. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Urusan pemerintahan konkruen dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang

wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berikut adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota:

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 - a) Pendidikan;
 - b) Kesehatan;
 - c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 - f) Sosial.
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 - a) Tenaga Kerja;
 - b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c) Pangan;
 - d) Pertanahan;
 - e) Lingkungan Hidup;
 - f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i) Perhubungan;
 - j) Komunikasi dan Informatika;
 - k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - l) Penanaman Modal;

- m) Kepemudaan dan Olahraga;
 - n) Statistik;
 - o) Persandian;
 - p) Kebudayaan;
 - q) Perpustakaan;
 - r) Kearsipan.
3. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
- a) Kelautan dan Perikanan;
 - b) Pariwisata;
 - c) Pertanian;
 - d) Kehutanan;
 - e) Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - f) Perdagangan;
 - g) Perindustrian;
 - h) Transmigrasi.

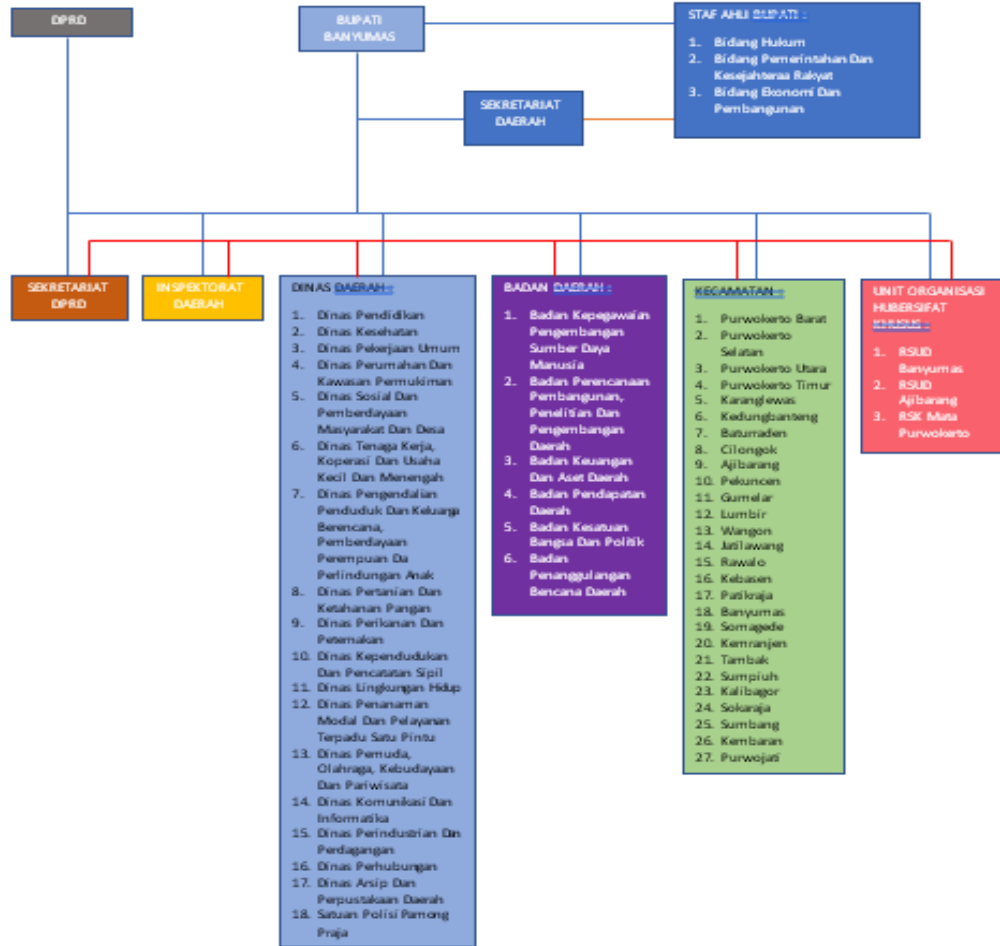
D. PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah membentuk kelembagaan Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2022 berjumlah 54 Perangkat Daerah dan 3 Unit Organisasi Bersifat Khusus, adapun struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Banyumas disajikan sebagai berikut:

Gambar 1.2.

Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Banyumas



Selain di bentuk Perangkat Daerah tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Banyumas juga membentuk Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). UOBK dan UPTD Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. UOBK :
 - a) Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;
 - b) Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;
 - c) Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto.
2. UPTD pada Dinas Kesehatan:
 - a) Puskesmas sebanyak 40;
 - b) Klinik sebanyak 2;
3. UPTD pada Dinas Pendidikan:

- a) SMP Negeri sebanyak 71;
 - b) SD Negeri sebanyak 761;
 - c) TK Negeri sebanyak 6;
 - d) Sanggar Kegiatan Belajar sebanyak 3.
4. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup:
 - a) Unit Pengelola Kebersihan dan Pertamanan Wilayah sebanyak 6;
 - b) Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - c) Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu.
 5. UPTD pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah: Balai Latihan Kerja.
 6. UPTD pada Dinas Perikanan dan Peternakan:
 - a) Pusat Kesehatan Hewan;
 - b) Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak;
 - c) Pengembangan Budidaya Air Tawar;
 - d) Rumah Potong Hewan.
 7. UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan: Balai Benih Pertanian.
 8. UPTD pada Satuan Polisi Pamong Praja: Unit Pemadam Kebakaran.
 9. UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan: Pasar Wilayah sebanyak 4
 10. UPTD pada Dinas Pemuda, Olahraga, kebudayaan dan Pariwisata:
 - a) Lokawisata Baturraden;
 - b) Lokawisata Purwomas;
 - c) Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga (GOR Satria).
 11. UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
 12. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum:
 - a) Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah sebanyak 7;
 - b) Laboratorium Konstruksi dan Peralatan.
 13. UPTD pada Dinas Perhubungan:
 - a) Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan;
 - b) Pengujian Kendaraan Bermotor.

E. SUMBER DAYA APARATUR

Salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Kondisi sumber daya aparatur pada Pemerintah Kabupaten Banyumas per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.1.

PNS berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
Golongan I	121	16	137	1,0
Golongan II	1.071	1.117	2.188	16,2
Golongan III	2.793	6.025	8.818	65,2
Golongan IV	1.070	1.316	2.386	17,6
Jumlah	4.793	7.524	12.317	100,00

Sumber: BKPSDM Kab. Banyumas, 2023

2. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 berdasarkan jenjang pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2.

PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi %
SD	229	226	455	3,7
SLTP UMUM	215	23	238	1,9
SLTP KEJURUAN	5	1	6	0,0
SLTA UMUM	539	204	743	6,0
SLTA KEJURUAN	291	153	444	3,6
DIPLOMA I	6	7	13	0,1
DIPLOMA II	55	45	100	0,8
D - II + A - II	1	0	1	0,0
SARJANA MUDA	0	2	2	0,0
BAKOLOREAT / AKADEMI	9	9	18	0,1
DIPLOMA III	389	1433	1822	14,8
D - III + A - III	1	1	2	0,0
DIPLOMA IV	54	128	182	1,5
SARJANA	2494	4446	6940	56,3
S 1 + A IV	123	366	489	4,0
PROFESI	69	244	313	2,5
S1 + PROFESI	4	5	9	0,1
PASCA SARJANA	268	213	481	3,9

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi %
SPECIALIS I	38	18	56	0,5
SPECIALIS II	1	0	1	0,0
DOKTOR	2	0	2	0,0
Jumlah	4.793	7.524	12.317	100

Sumber: BKPSDM Kab. Banyumas, 2023

3. Berdasarkan Jabatan

Jumlah PNS di Kabupaten Banyumas berdasarkan jabatannya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.3.

PNS berdasarkan Jabatan

Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
Pimpinan Tinggi	28	4	32	0,29
Administrator	137	57	194	1,79
Pengawas	259	251	510	4,70
Fungsional Tertentu	1594	1611	3205	29,51
Pelaksana	2293	4627	6920	63,71
Jumlah	4.311	6.550	10.861	100,00

Sumber: BKPSDM Kab. Banyumas, 2023

Berdasarkan tabel-tabel di atas, maka komposisi pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas bervariasi, yang menunjukkan adanya kesetaraan gender, dimana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan bekerja yang sama.

F. SUMBER DAYA KEUANGAN

Sumber daya keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD tahun 2023 Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4.

Komposisi APBD Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2023 (Sebelum Audit BPK RI)

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	3.555.835.860.922	3.587.231.980.162
1.1	Pendapatan Asli Daerah	889.320.206.922	870.559.278.394
1.2	Pendapatan Transfer	2.653.160.883.000	2.703.317.930.768
1.3	Lain-lain PAD yang sah	13.354.771.000	13.354.771.000
2.	Belanja Daerah	3.610.862.652.679	3.826.381.167.518
2.1	Belanja Operasi	2.651.993.962.047	2.867.524.592.948
2.2	Belanja Modal	318.390.681.234	380.971.106.227
2.3	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	4.301.288.269
2.4	Belanja Transfer	630.478.009.398	573.584.180.074
3.	Pembiayaan Daerah	61.935.784.000	54.235.784.000
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	116.962.575.757	293.384.971.356
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	61.935.784.000	54.235.784.000
	Pembiayaan Netto	55.026.791.757	239.149.187.356
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0	0

Sumber: BKAD Kab. Banyumas, 2023

G. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah dan masyarakat di masa datang. Suatu kondisi menjadi isu strategis jika kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang jika tidak dimanfaatkan. Dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, serta dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka diidentifikasi isu strategis

pembangunan daerah Kabupaten Banyumas saat ini sampai dengan tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebesar 73,17 menjadi 73,96 ditahun 2023. Salah satu usaha dalam peningkatan kualitas SDM adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Banyumas ditunjukkan dengan indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Angka RLS Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sebesar 7,87 (tujuh koma delapan puluh tujuh). Sementara angka HLS Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sebesar 13,26 yang artinya secara rata-rata anak usia 7 (tujuh) tahun yang masuk pendidikan pada tahun 2023 mengalami peluang untuk bersekolah selama 13,26 tahun. Capaian ini masih perlu dioptimalkan karena kurangnya budaya baca masyarakat dan masih adanya Anak Tidak Sekolah (ATS). Kondisi tersebut memberi gambaran kualitas sumber daya manusia Kabupaten Banyumas dari aspek pendidikannya.

Komponen kesehatan diukur dengan Usia Harapan Hidup (UHH) dimana UHH Kabupaten Banyumas tahun 2023 sebesar 74,2. Meskipun mengalami peningkatan namun masih lebih rendah dibanding dengan UHH Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 74,69. Beberapa layanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyumas belum memenuhi kondisi yang ideal, diantaranya adalah jumlah/rasio dokter spesialis dan tenaga medis, rasio rumah sakit per satuan penduduk, serta rasio puskesmas per satuan penduduk. Adanya kasus kematian ibu, gizi buruk, dan stunting menjadi perhatian dalam mempersiapkan generasi yang berkualitas di masa yang akan datang. Kualitas pelayanan kesehatan perlu terus ditingkatkan sehingga generasi baru memiliki peluang kehidupan yang lebih baik.

Pengendalian pertumbuhan penduduk diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena merupakan bagian dari peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, serta peningkatan kapabilitas dan daya saing pemuda. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diupayakan melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat serta pengendalian penduduk, agar

mendukung pencapaian bonus demografi pada tahun 2030, dimana penduduk Kabupaten Banyumas didominasi oleh penduduk usia produktif yang dipersiapkan sejak sekarang untuk menjadi sumber daya manusia berkualitas, serta selanjutnya dapat diserap oleh dunia kerja. Tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan lapangan kerja dan atau memperluas kesempatan berusaha, maka peluang bonus demografi tidak akan dapat dicapai bahkan akan dapat melahirkan kemiskinan baru.

2. Ketersediaan Infrastruktur

Keterbatasan infrastruktur merupakan isu nasional yang juga menjadi isu daerah. Penyediaan infrastruktur juga merupakan upaya untuk mendorong pencapaian Tujuan SDG's/TPB ke-9 (sembilan) yaitu Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan Serta Mendorong Inovasi serta Tujuan SDG's/TPB ke-11 (sebelas) yaitu Menjadikan Kota dan Permukiman Yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan. Kondisi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik di wilayah Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 sebesar 72,29%. Untuk jaringan irigasi dalam kondisi baik di wilayah Kabupaten Banyumas sampai dengan Tahun 2023 baru mencapai 81,29%. Guna mencukupi kebutuhan air terdapat jaringan irigasi sepanjang 665,930 km. Untuk mengatasi permasalahan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus berupaya melalui program dan kegiatan untuk meningkatkan jumlah maupun kualitas berbagai sarana dan prasarana baik berupa jaringan jalan, jaringan irigasi, air bersih, sanitasi, pemukiman serta transportasi sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang lebih mantap.

3. Pengembangan Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Pengembangan potensi daerah merupakan upaya untuk mendorong pencapaian Tujuan SDG's/TPB ke-Tujuan 8 (delapan) yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua serta pencapaian tujuan 10 (sepuluh) yaitu Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara.

Pengembangan usaha mikro merupakan salah satu potensi daerah yaitu dalam hal pembiayaan modal usaha, sumber daya manusia dan

kurang memiliki kemampuan manajerial serta promosi produk yang kurang menarik. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas berupaya menumbuhkembangkan melalui program dan kegiatan yang mendorong dan meningkatkan koperasi dan usaha mikro kecil serta pengembangan aktifitas ekonomi kreatif dan pariwisata.

4. Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan merupakan isu global yang juga menjadi isu nasional dan daerah saat ini, Kabupaten Banyumas mempunyai komitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas, meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan namun masih lebih tinggi dari rata-rata nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 mengalami penurunan 3.970 orang dari 220.470 orang menjadi 216.500 orang. Angka kemiskinan Kabupaten Banyumas tahun 2023 sebesar 12,53% turun 0,31 poin. Isu kemiskinan penduduk Kabupaten Banyumas terkait akses pelayanan dasar antara lain akses rumah layak, pangan, pendidikan dan kesehatan dan juga kesempatan berusaha dan bekerja, aspek keterampilan dan produktivitas kelompok serta belum terintegrasinya sasaran program dan kegiatan serta lokasi intervensi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Isu strategis lain terkait penanggulangan kemiskinan adalah mandatori kebijakan pemerintah pusat untuk mencapai tingkat kemiskinan ekstrem nol (zero) persen pada tahun 2024. Kondisi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banyumas tahun 2023 sebesar 1,39%. Mandat kebijakan ini harus dikawal dengan baik mengingat tantangan penanggulangan kemiskinan ekstrem sangat kompleks, karena merupakan akar dari kelompok masyarakat miskin dengan ciri utama kelompok masyarakat usia tidak produktif, tanpa keahlian dan pendidikan rendah. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Banyumas tahun 2023 sebesar 6,35%, ada kenaikan 0,30% dibandingkan tahun 2022. Tantangan pengurangan pengangguran adalah bagaimana meningkatkan penanaman modal atau investasi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang didukung dengan kebijakan penanaman modal yang sehat, kompetitif dan saling menguntungkan mendorong pengembangan UMKM, inovasi daerah, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

5. Pertanian mendukung Kedaulatan Pangan

Kedaulatan pangan di Kabupaten Banyumas dipersepsikan dengan Ketahanan Pangan. Kabupaten Banyumas telah menyusun regulasi ketahanan pangan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah tersebut meliputi: perencanaan pangan, kelembagaan, ketersediaan pangan, cadangan pangan, keterjangkauan pangan, distribusi pangan, penganeekaragaman pangan, konsumsi pangan dan gizi, keamanan pangan, sistem informasi pangan, penelitian dan pengembangan pangan, pengawasan dan pembinaan, peran serta masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia.

Kedaulatan Pangan di Kabupaten Banyumas diukur menggunakan pendekatan Indeks Ketahanan Pangan, yang pada tahun 2023 sebesar 79,81. Salah satu unsur Pilar Ketahanan Pangan adalah ketersediaan yang didalamnya terdapat produksi tanaman pangan. Data menunjukkan bahwa produksi tanaman pangan di Kabupaten Banyumas tahun 2023 yang terdiri dari padi, jagung dan kedelai sebesar 407.114,25 ton. Masih banyak kendala yang harus diatasi antara lain terjadinya konversi lahan pertanian, menurunnya kesuburan tanah, keterbatasan ketersediaan air dan infrastruktur irigasi, serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan perubahan iklim.

6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan merupakan isu yang mendapat perhatian cukup serius dalam proses pembangunan, baik di tingkat regional maupun nasional yaitu isu terkait lingkungan hidup dan bencana meliputi penurunan kualitas lingkungan hidup, kerusakan tutupan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, kelangkaan air, dan kelangkaan energi.

Sampai dengan tahun 2023 persentase peningkatan Ruang Terbuka Hijau publik mencapai 1,89%. Namun demikian persentase luasan ruang terbuka hijau publik tersebut masih jauh dari kebutuhan luas ruang terbuka hijau publik perkotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu minimal 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perkotaan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banyumas tahun 2022 adalah 63,81 sedangkan tahun 2023 adalah 65,31, dengan indeks untuk masing-

masing komponen IKLH sebagai berikut: Indeks Kualitas Air (IKA) = 51,79, Indeks Kualitas Udara (IKU) = 87,45, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) = 47,59. Nilai IKLH tersebut menggambarkan kualitas lingkungan Kabupaten Banyumas tahun 2023 masuk kategori sedang. Permasalahan lingkungan lain yang harus diperhatikan adalah pengelolaan sampah, pengelolaan sampah dilakukan secara komperhensif dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Kabupaten Banyumas melakukan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, hal ini dapat dilihat dari capaian pengelolaan sampah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kabupaten Banyumas berhasil mengelola sampah sebesar 25% tahun 2018, 40% tahun 2019, 60% tahun 2020 dan 90% tahun 2021 serta 99% Tahun 2022. Pada tahun 2023 produksi sampah Banyumas sudah mencapai 197.758,42 Ton, dengan pengurangan sebanyak 67,09% dan penanganan 32,23% sehingga sampah terkelola 99,31%. Sampah tersebut dikelola oleh 39 (tiga puluh sembilan) tempat pengolahan sampah (TPS3R/PDU dan TPST). Jumlah tersebut masih menyisakan 15 Truk Residu Sampah (90 m³) / hari yang di proses ke TPA BLE (Tempat Pemrosesan Akhir Berbasis Lingkungan dan Edukasi).

7. Tata Kelola Pemerintahan

Kinerja tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banyumas digambarkan dengan membaiknya Indeks Reformasi Birokrasi, yang pada tahun 2023 sebesar 76,9 meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 73,08. Reformasi birokrasi tidak hanya fokus pada persoalan administrasi, namun harus dapat berorientasi pada hasil atau dampak pembangunan daerah terutama pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan dalam penanganan stunting, peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi. Perubahan paradigma reformasi birokrasi tersebut menuntut adanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dengan memperkuat kapasitas dan kemampuan pola pikir sumber daya aparatur, yang secara simultan menuntut adanya proses adaptasi pada sistem dan pola kerja terutama pada proses bisnis pemerintahan meliputi perbaikan manajemen organisasi berbasis risiko, riset, dan inovasi (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan), digitalisasi pemerintahan, dan penguatan pelayanan publik. Selain itu, tantangan lainnya adalah

bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin kolaboratif dengan memperluas jejaring dan sinergi kerjasama baik antar pemerintah maupun antara pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Banyumas maka diperlukan tata kelola yang baik disemua aspek, diantaranya terkait dengan pengelolaan keuangan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Banyumas kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-12 (dua belas) kali atas laporan keuangan Pemerintah Daerah, opini WTP ini telah diperoleh sejak tahun 2011. Selain itu hasil evaluasi atas implementasi kinerja Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 adalah 80,53 dengan predikat "A". Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Memuaskan" yaitu instansi pemerintah dan unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

Untuk dapat bekerja secara efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif, maka ASN sebagai aparatur pemerintahan semakin dituntut profesionalitasnya dengan terus meningkatkan kompetensi, kualifikasi dan kinerja serta mampu mengimplementasikan core value ASN BerAKHLAK dalam meningkatkan pelayanan publik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam menghadapi dinamika perubahan dan untuk mewujudkan kemajuan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Banyumas memandang pentingnya penyusunan rencana strategis sebagai panduan utama dalam menetapkan arah pembangunan yang berdaya saing dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, telah ditetapkan 9 (sembilan) tujuan utama dan 22 (dua puluh dua) sasaran strategis. Setiap sasaran dilengkapi dengan indikator yang terukur, memastikan pencapaian yang konkret dan nyata dalam rangka memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Banyumas.

1. VISI

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah : **“MENJADIKAN BANYUMAS YANG MAJU, ADIL-MAKMUR DAN MANDIRI”**.

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut :

- Maju** : Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk ditinggali dan mampu menjadikan masyarakat bahagia. Masyarakat Banyumas yang maju adalah sumber daya manusia yang berkualitas, menguasai teknologi, dan memanfaatkan teknologi untuk kehidupan yang lebih baik. Daerah yang maju adalah yang mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, karena kemajuan yang dicapai tidak disertai dengan kemunduran atau penurunan kualitas lingkungan.
- Adil-
Makmur** : Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah upaya agar seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas mampu mengakses seluruh kebutuhan dasarnya, serta memiliki lebih banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemakmuran antara lain ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran yang adil berarti kemakmuran berkelanjutan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya masyarakat Kabupaten Banyumas saat ini tetapi juga generasi yang akan datang.

Mandiri : Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi Pelopor Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

2. MISI

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan melalui 8 (delapan) Misi, yang pelaksanaannya dituangkan dalam program Hasta Krida, yaitu :

- a. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik.
- b. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.
- d. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan.
- e. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan.
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata, dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal.
- h. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, tujuan dirumuskan sebagai gambaran kondisi di masa mendatang yang disesuaikan dengan isu-isu dan analisis strategis. Meskipun tujuan tidak selalu harus diukur secara kuantitatif, namun tetap menggambarkan arah pencapaian yang jelas. Sasaran, dalam hal ini, ditetapkan untuk dicapai dalam periode waktu tertentu, memastikan kemajuan yang berkelanjutan sesuai dengan Rencana Strategis/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023, setiap misi dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Tujuan 1** : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasarannya sebagai berikut :
 - 1) Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.
 - 2) Meningkatnya birokrasi yang kapabel.
 - 3) Meningkatnya pelayanan publik yang prima.
- b. Tujuan 2** : Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasarannya sebagai berikut :
 - 1) Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.
 - 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
 - 3) Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk.
 - 4) Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak.
- c. Tujuan 3** : Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan, dengan sasarannya yaitu: meningkatnya perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin.
- d. Tujuan 4** : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian, dengan sasarannya sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan dan perdagangan.

- 2) Meningkatnya produksi pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan perlindungan kepada petani.
- e. Tujuan 5** : Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis, dengan sasarannya yaitu : meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan dan agribisnis untuk ketersediaan pangan utama.
- f. Tujuan 6** : Perwujudan kawasan peruntukan industri dan Kawasan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja, dengan sasarannya sebagai berikut:
- 1) Meningkatnya investasi daerah.
 - 2) Meningkatnya kesempatan berusaha.
 - 3) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup.
 - 4) Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan.
 - 5) Meningkatnya penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim
- g. Tujuan 7** : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat, dengan sasarannya yaitu : meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata dan memadai.
- h. Tujuan 8** : Menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan sasarannya sebagai berikut:
- 1) Meningkatnya industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal.
 - 2) Meningkatnya pertumbuhan pelaku ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- i. Tujuan 9** : Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, dengan sasarannya sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kerukunan masyarakat dan peran masyarakat dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram.
- 2) Meningkatnya kelestarian kebudayaan daerah.
- 3) Meningkatnya peran dan daya saing pemuda.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen Bupati yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur.

Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah serta kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia.

Mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas tahun 2023 serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas dan Perubahannya Tahun 2023, telah disusun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2023 sebagai berikut :



Tabel 2.1.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	
1.	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	75	
2.	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,58	
3.	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	Persentase penduduk miskin	%	11	
4.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	1.	Pertumbuhan Ekonomi/Persentase pertumbuhan PDRB	%	5,00
		2.	PDRB per kapita	Juta Rp.	35,513
5.	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	74,04	
6.	Perwujudan kawasan peruntukan industri dan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	1.	Persentase pertumbuhan nilai investasi daerah	%	2
		2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,50
		3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	64,15
7.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	Persentase Kinerja Infrastruktur	%	78,87	
8.	Menumbuhkan dan	Kontribusi sektor Pariwisata	%	7	

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
	mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif	terhadap PAD		
9.	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	Angka kriminalitas	Per 10.000 penduduk	1,516

Sumber Data : Perjanjian Kinerja, 2023

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 dianggarkan melalui :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (APBD) Tahun 2023, yang ditetapkan dengan :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 - b. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (APBD) tahun 2023 ditetapkan :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023.
 - b. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023.

Alokasi anggaran berdasarkan tujuan untuk masing-masing kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023

NO.	TUJUAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	927.128.633.528
2.	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	806.341.589.807
3.	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	268.143.959.495
4.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	286.127.950.342
5.	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	243.571.906.287
6.	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	252.879.576.567
7.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	480.479.955.726
8.	Menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif	247.731.665.107
9.	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	313.975.930.661
	JUMLAH	3.826.381.167.518

Sumber Data : Aplikasi Jegos Kabupaten Banyumas (diolah), 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 ini didasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023, serta pencapaian sasaran strategis selama tahun 2023.

Pengukuran keberhasilan dengan tolak ukur akuntabilitas kinerja mengandung arti bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses membandingkan target kinerja dengan realisasinya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam skala nilai dan predikat kinerja sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Skala Nilai	Predikat Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi

No.	Skala Nilai	Predikat Kinerja
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

Hasil pengukuran atas indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

Tujuan/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
TUJUAN 1					
Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					
1. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	75	76,9	102,53	Sangat Tinggi
TUJUAN 2					
Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat					
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,58	73,96	101,9	Sangat Tinggi
TUJUAN 3					
Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan					
3. Persentase penduduk miskin	%	11,00	12,53	86,09	Tinggi
TUJUAN 4					
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian					
4. Pertumbuhan Ekonomi/Persentase Pertumbuhan PDRB	%	5,0	5,4	108	Sangat Tinggi
5. PDRB per Kapita	Juta rupiah	35,513	37,6	105,88	Sangat Tinggi
TUJUAN 5					
Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis					

Tujuan/Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
6.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	74,04	79,81	107,79	Sangat Tinggi
TUJUAN 6						
Perwujudan kawasan peruntukan industri dan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja						
7.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	%	2	21,72	1.086	Sangat Tinggi
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,50	6,35	58,89	Rendah
9.	Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	64,15	65,3	101,79	Sangat Tinggi
TUJUAN 7						
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat						
10.	Persentase Kinerja Infrastruktur	%	78,87	69,15	87,68	Tinggi
TUJUAN 8						
Menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif						
11.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	7	7,2	102,86	Sangat Tinggi
TUJUAN 9						
Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat						
12.	Angka Kriminalitas	Per 10.000 penduduk	1,516	1,93	72,69	Sedang
RATA-RATA CAPAIAN					176,84	Sangat Tinggi
<i>Keterangan : * adalah Capaian Kinerja Tahun 2022</i>						

Sumber : E-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

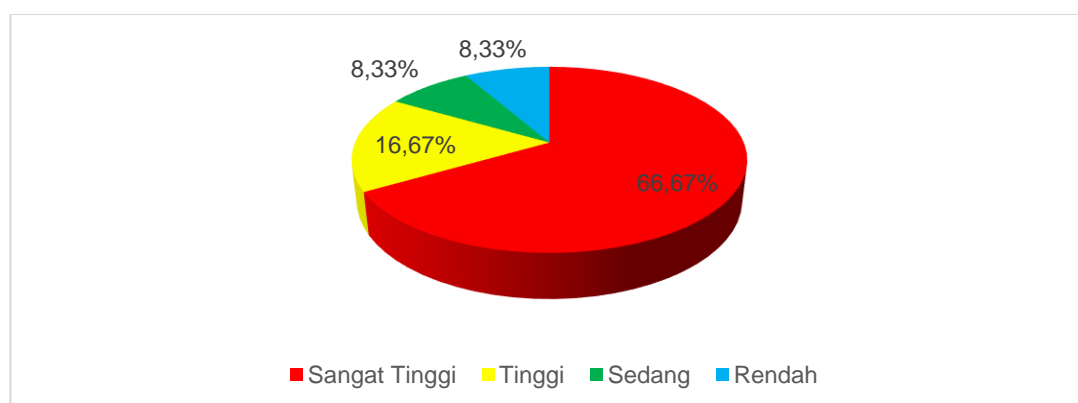
Berdasarkan tabel tersebut di atas maka rata-rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2023 adalah sebesar **176,84%** dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**, maka capaian kinerja dapat dikelompokkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3.
Predikat Kinerja Tahun 2023

No.	Kriteria Penilaian Predikat Kinerja	IK	%
1	Sangat tinggi	8	66,67
2	Tinggi	2	16,67
3	Sedang	1	8,33
4	Rendah	1	8,33
5	Sangat rendah	-	-
Jumlah IKU		12	100

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja dapat digambarkan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sebagaimana grafik berikut ini :

Grafik 3.1.
Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023



Sumber : Bagian Organisasi (diolah), 2023

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN

1. TUJUAN 1 : Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Kinerja tata kelola pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Banyumas digambarkan dengan membaiknya Indeks Reformasi Birokrasi, yang pada tahun 2023 sebesar 76,9 meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 73,08. Namun demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana birokrasi dapat menjadi katalisator dalam akselerasi pencapaian kinerja pembangunan daerah. Reformasi birokrasi tidak hanya fokus pada persoalan administrasi, namun harus dapat berorientasi pada hasil atau

dampak pembangunan daerah terutama penanggulangan kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kualitas lingkungan hidup yang memadai. Perubahan paradigma reformasi birokrasi tersebut menuntut adanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dengan memperkuat kapasitas dan kemampuan pola pikir sumber daya aparatur, yang secara simultan menuntut adanya proses adaptasi pada sistem dan pola kerja terutama pada proses bisnis pemerintahan meliputi perbaikan manajemen organisasi berbasis risiko, riset, dan inovasi (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan), digitalisasi pemerintahan, dan penguatan pelayanan publik. Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin kolaboratif dengan memperluas jejaring dan sinergi kerjasama baik antar pemerintah maupun antara pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Pada tahun 2023 terdapat perbedaan penilaian implementasi Reformasi Birokrasi (RB) dengan tahun sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan penajaman evaluasi reformasi birokrasi (RB) dengan lebih mengukur indeks reformasi birokrasi dari sisi dampak kinerja dibandingkan dengan sisi proses yang cenderung bersifat administratif. Terdapat dua fokus pelaksanaan reformasi birokrasi (RB). Dua fokus yang dikenal dengan *'double track'* ini terdiri dari fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. RB General bertujuan memperbaiki manajemen internal seluruh instansi pemerintah sedangkan untuk RB Tematik bertujuan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Untuk RB Tematik terdapat 5 (lima) tema yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan dalam penanganan stunting, serta percepatan prioritas aktual presiden. Adapun prioritas aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, proses evaluasi dilakukan oleh tim penilai nasional (TPN) dan tim penilai meso (TPM) melalui Portal RB Nasional. Kementerian PAN dan RB telah mengumumkan hasil penilaian implementasi RB untuk tahun 2023. Secara lebih rinci realisasi capaian indeks reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.4.

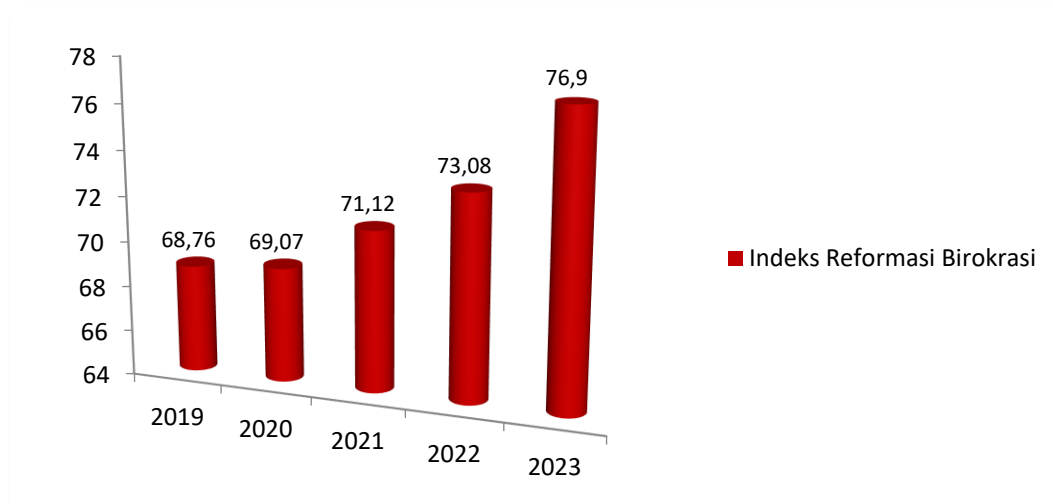
Capaian Kinerja Tujuan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023			Target 2023 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d Th 2023
		Target	Realisasi	%		
Indek Reformasi Birokrasi	Indeks	75	76,9	102,53	75	102,53

Adapun realisasi indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bayumas dari Tahun 2019-2023 disajikan dalam grafik berikut ini :

Grafik 3.2.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023



Sumber : LHE RB Kementerian PAN dan RB, 2023

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan target Nasional tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Target Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Provinsi Jawa Tengah	Target Nasional	Persentase Kinerja terhadap Capaian Provinsi Jawa Tengah	Persentase Kinerja terhadap target Nasional
Indeks Reformasi Birokrasi	76,9	83,13	85% Kab/Kota yang memiliki Indeks RB "Baik"*	92,51	128,14

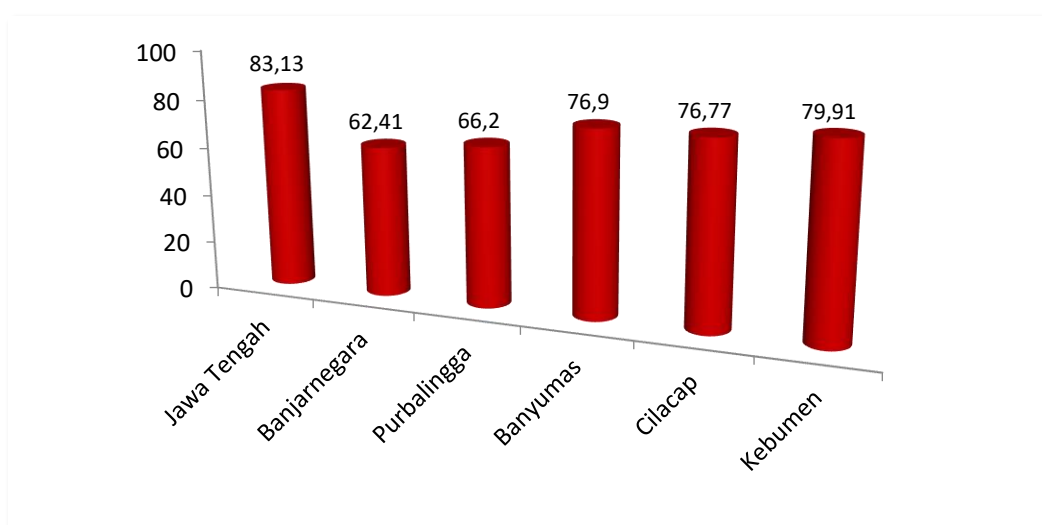
* : Indeks RB Baik nilai >60-70

Capain Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2023 sebesar 76,9 dengan predikat "BB" masih di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 83,13 dengan predikat "A", namun capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah dapat melampaui target Nasional yang mentargetkan Indeks Reformasi Birokrasi Kab/Kota dengan predikat "Baik atu B".

Berikut ini perbandingan capaian indeks Kabupaten Banyumas dengan kabupaten di sekitar dan Provinsi Jawa Tengah.

Grafik 3.3.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



Sumber : Bagian Organisasi (diolah), 2023

Capaian kinerja tujuan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 adalah sebesar 76,9. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.6.

Rincian Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi
Kabupaten Banyumas Tahun 2023

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2023
1.	RB General	100	66,92
2.	RB Tematik	20	9,98
Indeks Reformasi Birokrasi (1+2)		120	76,9

Sumber : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023

Prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik diantaranya berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Kabupaten Banyumas sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2023 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebanyak 12 (dua belas) kali. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan kabupaten Banyumas telah memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Selain itu pemerintah Banyumas juga dinilai telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Opini tersebut juga menunjukkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Banyumas yang terus membaik, dengan transparansi anggaran melalui informasi APBD secara online yang dapat diakses oleh publik. Pencapaian ini harus terus dipertahankan agar terjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Banyumas. Akuntabilitas yang dilaksanakan oleh Kabupaten Banyumas juga tergambar dari perolehan penghargaan atas implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2023 mendapat predikat “A” dengan nilai 80,53.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pencapaian Tujuan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Upaya yang akan dan yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi adalah:

- a) Adanya komitmen Kepala Daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan menetapkan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Kabupaten Banyumas;
- b) Penetapan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2023-2024 yang merupakan tindak lanjut atas di tetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- c) Adanya inovasi TERAP REBO (Penerapan Reformasi Birokrasi)
Pemerintah Kabupaten Banyumas merencanakan menerapkan dan mengembangkan inovasi TERAP REBO yang merupakan upaya Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan penerapan Reformasi Birokrasi Tematik (RB-Tematik) yang berfokus pada mendorong digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan yang terintegrasi untuk menanggulangi kemiskinan, sehingga Tata kelola Pemerintah menjadi efektif dan kolaboratif dalam menyelesaikan Isu strategis dan dapat langsung berdampak bagi percepatan pembangunan serta bagi kesejahteraan masyarakat. Inovasi TERAP REBO ini diwujudkan dengan inovasi PADU DADI GEMUYU (Perencanaan TerpaDU Berbasis DAta Digital untuk Percepatan PenGentasan KEMiskinan Menuju BanYumas MajU). PADU DADI GEMUYU merupakan inovasi percepatan kemiskinan yang berfokus pada perencanaan dan pengelolaan data digital agar kemiskinan yang ditangani tepat sasaran.
Digitalisasi yang terintegrasi pada penyelenggaraan pemerintahan ini merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan kualitas manajemen internal pada Pemerintahan Kabupaten Banyumas, meliputi peningkatan kualitas tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen atau pengelolaan unsur manajemen, yang berpedoman pada peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka,

memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

- d) Meningkatkan intensitas pendampingan, monitoring dan evaluasi rencana aksi RB secara berkala pada Perangkat Daerah pengampu RB General dan RB Tematik.
- e) Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan agar selaras dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih berdampak kepada masyarakat.
- f) Meningkatkan kolaborasi berbagai pihak baik dari pemerintah maupun nonpemerintah dalam tujuan pembangunan.
- g) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi RB oleh Kementerian PAN dan RB.

Tercapainya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi didukung oleh 33 (tiga puluh tiga) program dengan total anggaran sejumlah Rp. 927.128.633.528,- dan realisasi sebesar Rp. 866.331.619.062,- sehingga rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 93,44%. Dari 33 program yang realisasi mencapai lebih dari 80% sebanyak 28 (dua puluh delapan) program.

Gambar 3.1.

Penerimaan Penghargaan SAKIP Kabupaten/Kota Tahun 2023



Sumber : Humas Kab. Banyumas, 2023

2. TUJUAN 2 : Meningkatkan Kualitas SDM Terutama Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat

Dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan 1 (satu) indikator utama, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.

Secara lebih rinci realisasi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.7.

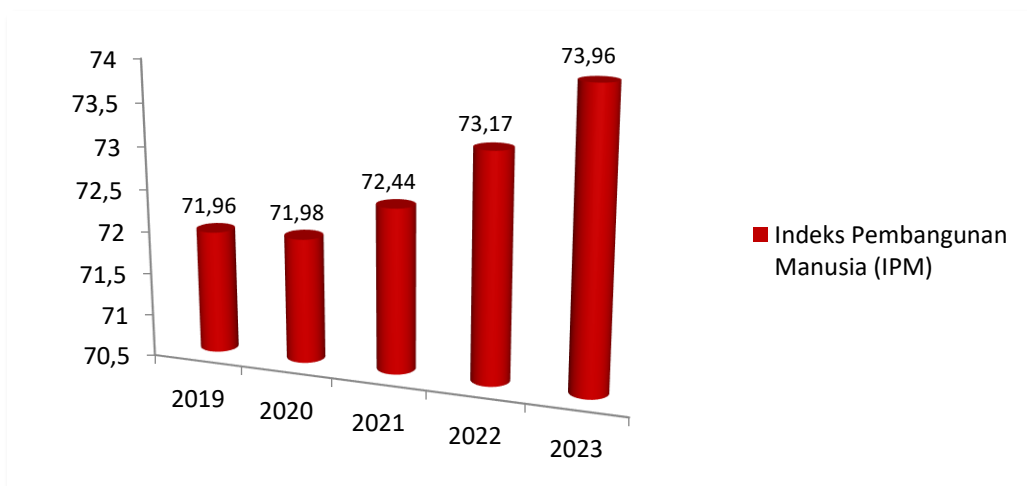
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Kualitas SDM Terutama Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023			Target 2023 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d Th 2023
		Target	Realisasi	%		
Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,58	73,96	101,9	72,58	101,9

Adapun realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyumas dari Tahun 2019-2023 disajikan dalam grafik berikut ini :

Grafik 3.4.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023



Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8.

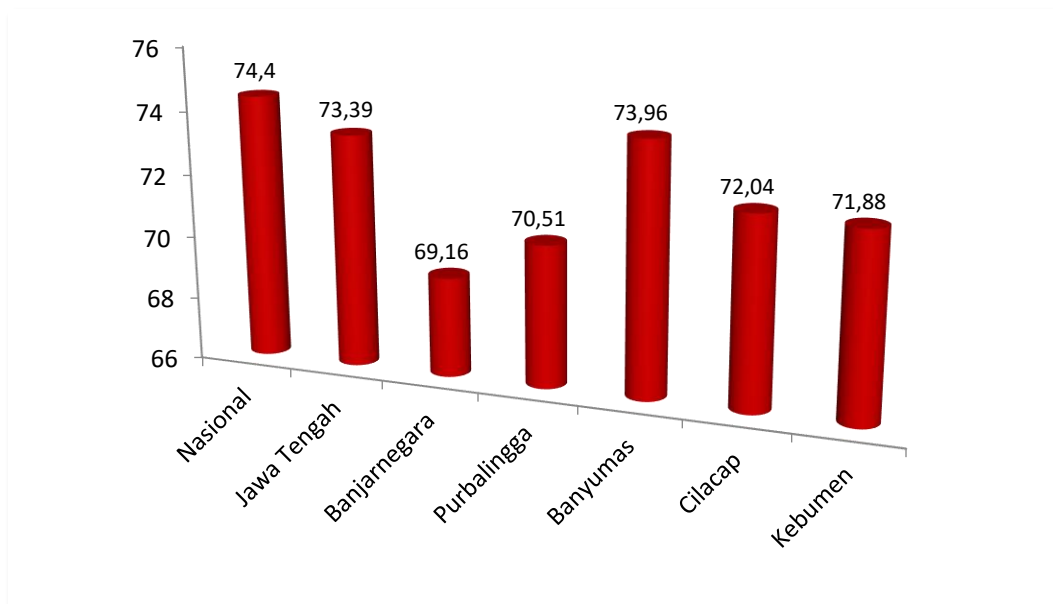
Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Provinsi Jawa Tengah	Capaian Nasional	Persentase Kinerja terhadap Capaian Provinsi Jawa Tengah	Persentase Kinerja terhadap Capaian Nasional
Indek Pembangunan Manusia	73,96	73,39	74,4	99,96	99,42

Tingkat pembangunan manusia suatu negara atau daerah dikelompokkan dalam beberapa kategori, yakni kategori rendah ($0 \leq \text{IPM} < 60$), kategori sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$), kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$) dan kategori sangat tinggi ($80 \leq \text{IPM} \leq 100$). Kabupaten Banyumas termasuk dalam kategori IPM tinggi. Dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya dan Provinsi Jawa Tengah IPM Kabupaten Banyumas peringkatnya paling tinggi, namun masih di bawah nasional. IPM Kabupaten Banyumas apabila dibandingkan dengan kabupaten di sekitar, dengan Provinsi Jawa Tengah serta nasional adalah sebagai berikut :

Grafik 3.5.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

IPM meliputi tiga komponen yaitu, komponen pendidikan yang diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, komponen umur harapan hidup serta komponen pengeluaran perkapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli. Berikut komponen IPM :

a) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan dari tahun 2022. HLS Tahun 2023 adalah sebesar 13,26 tahun, artinya anak usia 7 (tujuh) tahun keatas akan mempunyai peluang bersekolah sampai 13 (tiga belas) tahun atau lulus Diploma I.

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyumas apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9.

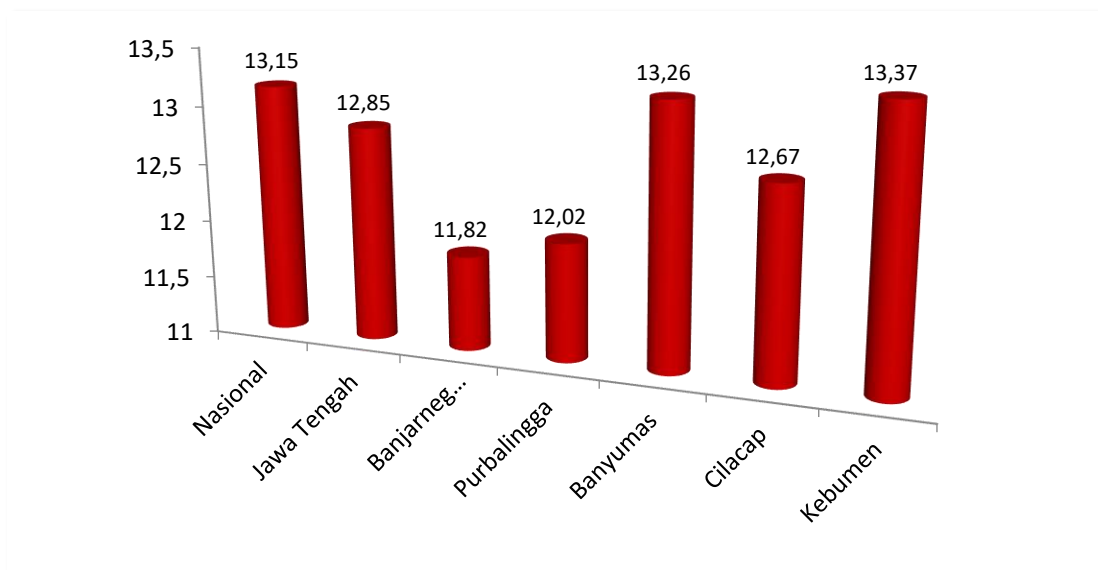
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Banyumas Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Provinsi Jawa Tengah	Capaian Nasional	Persentase Kinerja terhadap Capaian Provinsi Jawa Tengah	Persentase Kinerja terhadap Capaian Nasional
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,26	12,85	13,15	103,19	100,84

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyumas apabila dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.6.

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pada tahun 2023, Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar berada pada peringkat ke 2 setelah Kabupaten Kebumen dan berada di atas Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah adalah :

- 1) Mengawal kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs dengan melakukan pendampingan dan bimbingan teknis.
- 2) Memberikan Bantuan Pendidikan setara dengan Program Indonesia Pintar (PIP) yang mejadi program strategis di tingkat pusat berupa Kartu Banyumas Pintar (KBP). Dinas Pendidikan memberikan bantuan ini kepada peserta didik SD dan SMP yang merupakan anak dari keluarga kurang mampu berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas.
- 3) PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) bekerja sama dengan Pesantren Non-Formal untuk mendorong warga usia sekolah yang tidak sekolah untuk mengikuti program kejar paket.
- 4) Kampanye dan Sosialisasi bagi orang-orang dewasa yang belum menamatkan pendidikan dasar, pendidikan menengah, atau bahkan pendidikan tinggi untuk kembali lagi masuk ke pendidikan nonformal melalui pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C.
- 5) Melakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dengan pihak swasta dalam membangun kesepakatan mendukung perencanaan strategis pembangunan khususnya bidang pendidikan dengan ikut memberikan timbal balik berupa *Corporate Social Responsibility* (CSR) di bidang pendidikan seperti membangun sarana sekolah, pembiayaan bagi program Paket B, Paket C, beasiswa siswa kurang mampu.

b) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Rata-rata lama sekolah yang digunakan dalam penghitungan IPM di ukur dari penduduk berusia 25 tahun ke atas, karena pada usia tersebut proses belajar pada pendidikan formal telah berakhir.

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Banyumas apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10.

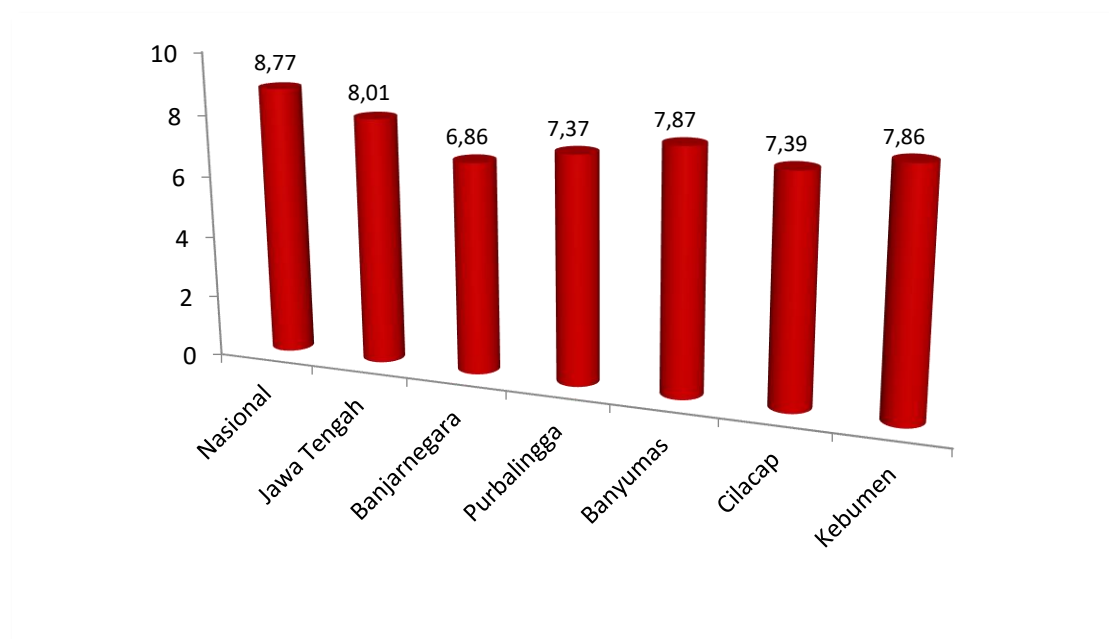
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Banyumas Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Provinsi Jawa Tengah	Capaian Nasional	Persentase Kinerja terhadap Capaian Provinsi Jawa Tengah	Persentase Kinerja terhadap Capaian Nasional
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,26	12,85	13,15	103,19	100,84

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Banyumas apabila dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.7.

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar berada pada peringkat pertama. Nilai tersebut masih di bawah Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Faktor penghambat yang menyebabkan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banyumas berada dibawah provinsi dan nasional antara lain :

- 1) Masih banyaknya masyarakat yang belum menamatkan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- 2) Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) masih tinggi, masih besarnya jumlah anggota keluarga/ yang mempengaruhi peluang anak untuk dapat meneruskan pendidikannya. Seperti mendukung anak untuk bekerja membantu orang tua daripada sekolah.
- 3) Sekolah dan Guru yang tidak tersebar merata khususnya sekolah negeri (SD dan SMP).
- 4) Keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan pendidikan yang mudah dijangkau serta penyediaan sarana transportasi yang mudah, murah, dan layak bagi anak sekolah.
- 5) Belum merata kualifikasi tenaga pendidik di seluruh jenjang pendidikan.

Upaya yang akan dilakukan dalam meningkatkan Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah :

- 1) Pembentukan Tim di Tingkat Kabupaten untuk Program Penanganan Anak Tidak Sekolah – Gerakan Sekolah Maneh (ATS- GSM);
- 2) Mendorong agar anak tidak sekolah (ATS) dapat melanjutkan pendidikan kembali baik melalui SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) maupun PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat);
- 3) Pemberian beasiswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Banyumas Pintar (KBP);
- 4) Pembangunan unit sekolah baru, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas dan kelengkapan fasilitas, dan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- 5) Peningkatan pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan.

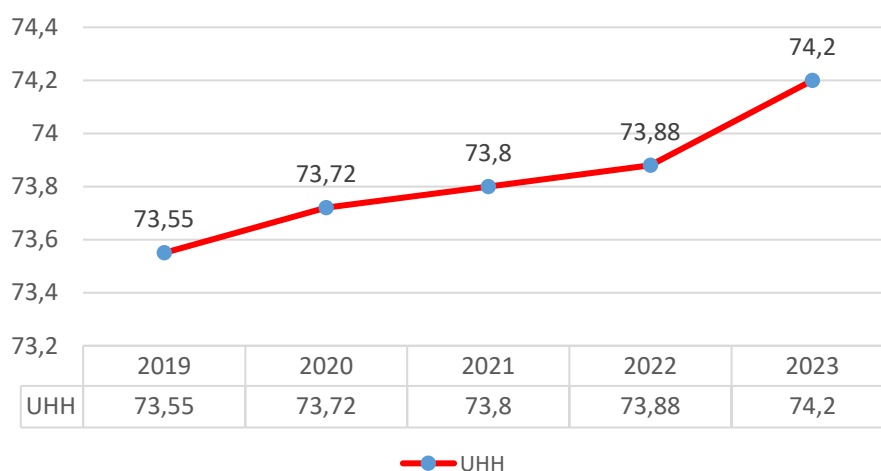
c) Umur Harapan Hidup

Indeks Kesehatan merupakan salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan ukuran yang digunakan sebagai bahan perhitungan Indeks Kesehatan yaitu Umur Harapan Hidup (UHH). UHH mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat dimana

mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan bidang kesehatan. Semakin tinggi UHH maka derajat kesehatan masyarakat semakin baik dan hal ini didukung oleh keberhasilan dalam pembangunan bidang kesehatan. Sebaliknya pembangunan bidang kesehatan yang kurang berhasil berdampak pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat sehingga UHH rendah. UHH penduduk Kabupaten Banyumas selama 5 (lima) tahun dapat dilihat dalam grafik berikut :

Grafik 3.8.

Umur Harapan Hidup (UHH) Penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023



Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa UHH penduduk Kabupaten Banyumas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Selama tahun 2019 hingga 2023 terjadi peningkatan sebesar 0,88%. UHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Umur Harapan Hidup Kabupaten Banyumas apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11.

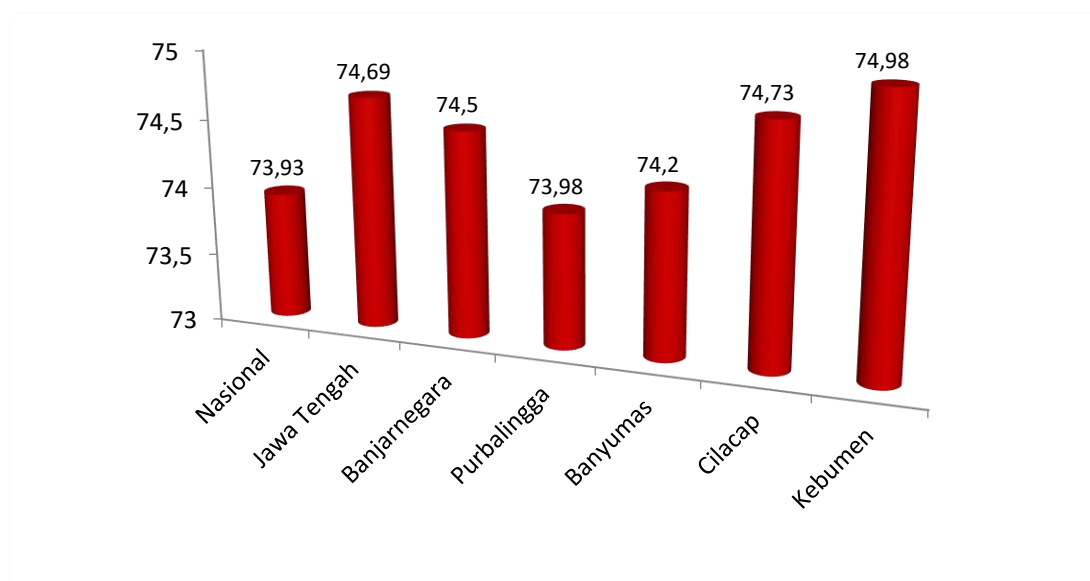
Umur Harapan Hidup Kabupaten Banyumas Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Provinsi Jawa Tengah	Capaian Nasional	Persentase Kinerja terhadap Capaian Provinsi Jawa Tengah	Persentase Kinerja terhadap Capaian Nasional
Umur Harapan Hidup	74,2	74,69	73,93	99,34	100,37

Umur Harapan Hidup Kabupaten Banyumas apabila dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.9.

Umur Harapan Hidup Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Berdasarkan grafik 3.9 diketahui bahwa Kabupaten Banyumas berada pada peringkat ke-4 (empat) UHH dari 5 (lima) kabupaten sekitar. Sedangkan UHH Kabupaten Banyumas lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasional, tetapi masih lebih rendah dari UHH Provinsi Jawa Tengah. Faktor yang menjadi kendala UHH Kabupaten Banyumas lebih rendah dibandingkan dengan UHH Provinsi Jawa Tengah diantaranya :

- 1) Jumlah tenaga medis yang belum memadai
Jumlah dokter di Kabupaten Banyumas tahun 2023 sebanyak 606 orang dengan rasio 32,6 per 100.000 penduduk. Rasio tersebut masih dibawah target yang ditetapkan Kementerian kesehatan Republik Indonesia sebesar 50 per 100.000 penduduk. Sedangkan pada tahun 2023, jumlah dokter spesialis yang tersebar di Rumah Sakit se-Kabupaten Banyumas sebanyak 353 orang dengan rasio 19 per 100.000 penduduk, dengan kata lain sudah mencapai target yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, yaitu 12 per 100.000 penduduk.
- 2) Banyaknya penduduk miskin
Menurut BPS Kabupaten Banyumas, banyaknya penduduk miskin di Kabupaten Banyumas tahun 2023 sebesar 12,53%. Penduduk miskin cenderung memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan informasi kesehatan, sehingga kurang mampu untuk mengadopsi gaya hidup sehat. Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit juga dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pemeriksaan rutin dan pengobatan yang diperlukan.
- 3) Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI)
Angka Kematian Ibu salah satu indikator penting dalam evaluasi kesehatan maternal di suatu wilayah. Pada tahun 2023, Angka Kematian Ibu di Kabupaten Banyumas mencapai 91,93 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu Provinsi Jawa Tengah sebesar 88,11 per 100.000 kelahiran hidup. Hal tersebut mencerminkan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Banyumas termasuk kategori tinggi dimana jumlah kasus kematian ibu tahun 2023 menempati peringkat ke-4 (empat) tertinggi diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Kendala tersebut menjadi tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka mewujudkan tujuan Pemerintah Daerah, yaitu meningkatkan kualitas SDM khususnya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.. Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam hal ini telah melakukan upaya melalui :

- 1) Pelaksanaan program pembangunan kesehatan
Pelaksanaan fisik program pembangunan kesehatan di Kabupaten Banyumas tahun 2023 dalam hal meningkatkan akses dan kualitas terhadap pelayanan kesehatan diantaranya melakukan pembangunan Puskesmas Purwokerto Timur I (relokasi) dan gedung Laboratorium Kesehatan Masyarakat *Biosafety Level 2* (BSL-2). Rehabilitasi Puskesmas dilakukan pada 11 (sebelas) Puskesmas dan 2 (dua) Puskesmas Pembantu (Puskesmas Pembantu Grujungan dan Puskesmas Pembantu Kedungrandu). Peningkatan sarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan dengan pengadaan ambulance untuk Puskesmas Rawalo, Puskesmas Gumelar, Puskesmas Sumpiuh II, dan Puskesmas Pekuncen II. Beserta pengadaan alat kesehatan beberapa diantaranya berupa *Hematology Analyzer, Photometer, NAAT QrtPCR, EKG, Vaccine Refrigerator*.
- 2) Pelaksanaan program sosial khususnya kesehatan lingkungan
Program sosial terutama dalam bidang kesehatan lingkungan, bertujuan untuk menyediakan sarana sanitasi dasar yang layak bagi masyarakat, seperti program rumah sehat, pembangunan jamban yang higienis (jamban sehat), dan penyediaan akses air bersih. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi lingkungan yang sehat dan mencegah penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sanitasi yang layak.
- 3) Pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin
Pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas merupakan suatu upaya yang sangat penting untuk memastikan bahwa individu memiliki akses yang setara dan terjangkau terhadap layanan kesehatan yang berkualitas melalui JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat) APBD. Sebanyak 962.077 jiwa penduduk Kabupaten Banyumas berstatus sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN dan 79.676 jiwa sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD dengan total PBI APBN dan APBD sebanyak 1.041.753 jiwa. Dalam pelaksanaannya disertai dukungan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas berupa Instruksi Bupati

Banyumas Nomor 440/7804 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN di Kabupaten Banyumas.

4) Penanganan Angka Kematian Ibu (AKI)

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menurunkan AKI diantaranya :

- Pertemuan Pokja Penyelamatan Ibu dan Bayi dikemas dalam kegiatan “*Coffe Morning*” bersama Bupati Banyumas;
- Pertemuan pembentukan Jejaring Skrining Layak Hamil, ANC (*Antenatal Care*) dan Stunting;
- Orientasi Forum Masyarakat Madani (FMM) bagi petugas promosi kesehatan;
- Pendampingan Tim Ahli Sp.OG dan Sp.A di Puskesmas;
- Disemenasi hasil monitoring dan evaluasi RS PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) dan Puskesmas PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar);
- Kegiatan supervisi layanan kesehatan ibu, anak dan gizi di Posyandu, serta
- Pertemuan pembelajaran massal hasil rekomendasi AMPSR (Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon) Kasus Kematian Ibu dan Bayi.

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah memberikan dukungan yang signifikan dalam keberhasilan pelaksanaan upaya dan intervensi pada penurunan AKI. Hal ini tercermin dari komitmen yang tinggi dari Bupati dalam memprioritaskan isu kesehatan maternal, serta kebijakan dan regulasi yang mendukung seperti :

- 1) Peraturan Daerah Banyumas Nomor 41 tahun 2014 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita;
- 2) Keputusan Bupati Banyumas Nomor 73 tahun 2017 tentang Pembentukan Pokja Penyelamatan Ibu dan Bayi;
- 3) Instruksi Bupati Banyumas Nomor 440/3072 Tahun 2017 tentang Upaya Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi Kabupaten Banyumas.

d) Pengeluaran Perkapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Banyumas apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12.

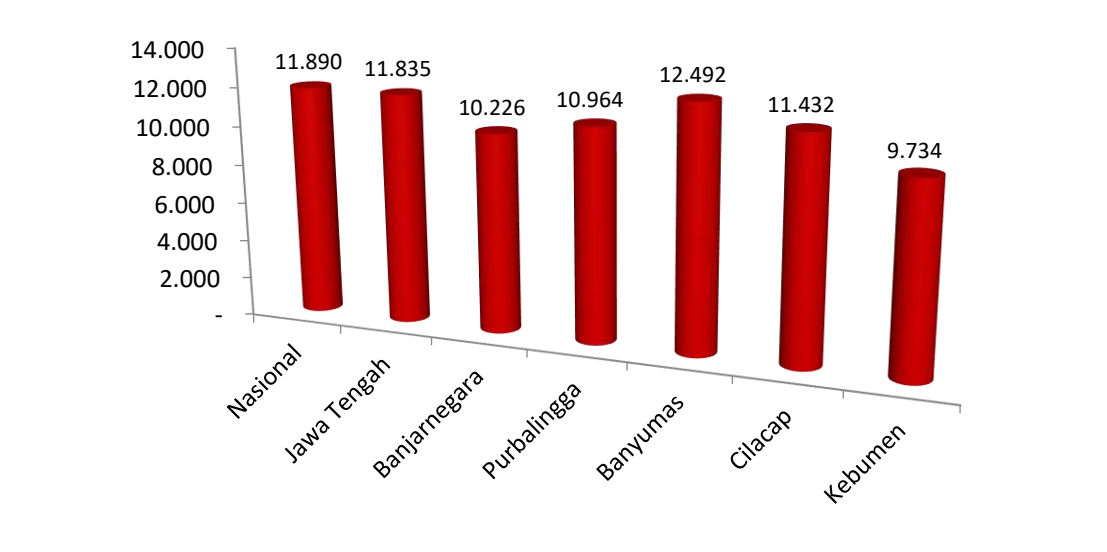
Pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Banyumas Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 (ribu rupiah)

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Provinsi Jawa Tengah	Capaian Nasional	Persentase Kinerja terhadap Capaian Provinsi Jawa Tengah	Persentase Kinerja terhadap Capaian Nasional
Pengeluaran per kapita disesuaikan	12.492	11.835	11.890	105,55	105,06

Pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Banyumas apabila dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.10.

Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 (ribu rupiah)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Banyumas dengan kabupaten sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2023 paling tinggi dari capaian kabupaten sekitar dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Tercapainya tujuan meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didukung oleh 18 (delapan belas) program dengan total anggaran sejumlah Rp. 806.341.589.807,- dan realisasi sebesar Rp. 726.040.947.402,- sehingga rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 90,04%. Dari 18 (delapan belas) program yang realisasi mencapai lebih dari 80% sebanyak 16 (enam belas) program.

Gambar 3.2.

Pembangunan SMPN 10 Purwokerto



Sumber : Humas Kab. Banyumas, 2023

Gambar 3.3.

Peresmian SMPN 10 Purwokerto oleh Pj.Bupati Banyumas



Sumber : Humas Kab. Banyumas, 2023

Gambar 3.4.

Peresmian Rumah Anak SIGAP (Pusat Pengasuhan untuk Cegah Stunting)



Sumber : Humas Kab. Banyumas, 2022

3. TUJUAN 3 : Meningkatkan Pembangunan yang Berkeadilan

Dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan pembangunan yang berkeadilan, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan 1 (satu) indikator utama, yaitu Persentase Penduduk Miskin.

Secara lebih rinci realisasi capaian Persentase Penduduk Miskin adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.13.

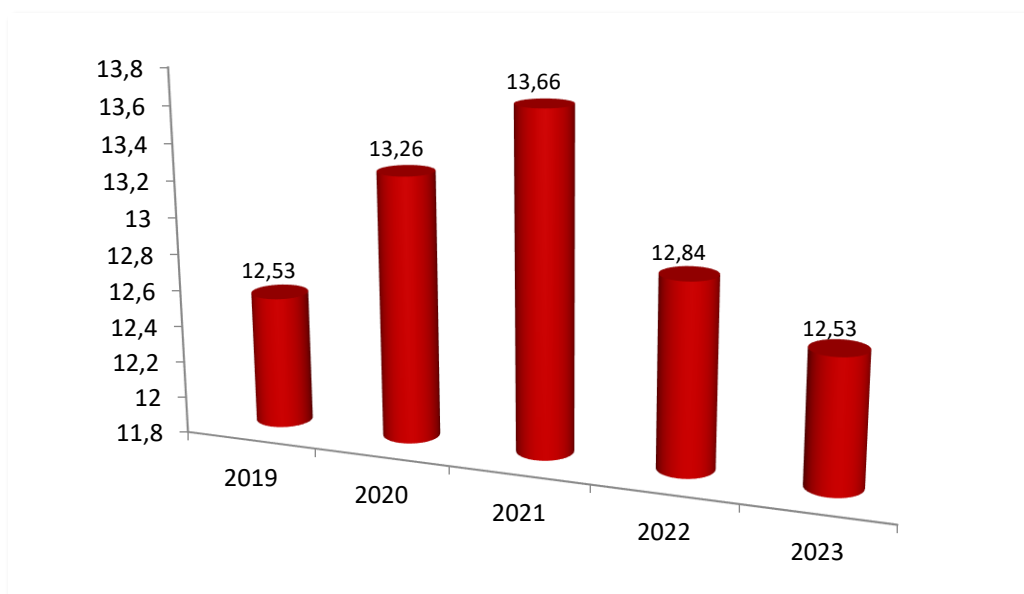
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Pembangunan yang Berkeadilan
Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023			Target 2023 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d Th 2023
		Target	Realisasi	%		
Persentase Penduduk Miskin	%	11,00	12,53	86,09	11,00	86,09

Adapun realisasi indikator kinerja Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas dari Tahun 2019-2023 disajikan dalam grafik berikut ini :

Grafik 3.11.

Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024 telah menetapkan kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2022-2024, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Banyumas. Sesuai mandatori

kebijakan pemerintah pusat melalui arahan/instruksi presiden bahwa capaian tingkat kemiskinan ekstrem nol (zero) persen pada tahun 2024.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Tujuan Meningkatkan Pembangunan yang Berkeadilan

Dampak Pandemi COVID-19 masih berlanjut pada aspek sosial ekonomi yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banyumas berusaha menangani dampak pandemi COVID-19 dengan upaya pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi untuk pemulihan kondisi kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan, dengan fokus pada masyarakat dengan kesejahteraan terbawah yang termasuk dalam kelompok miskin ekstrem.

Adapun jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin dari tahun 2019 sampai dengan 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.14.

Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Banyumas dari Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2019	211,65	12,53
2020	225,84	13,26
2021	232,91	13,66
2022	220,47	12,84
2023	216,50	12,53

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Dengan jumlah penduduk yang besar maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas juga tinggi. Dalam lingkup regional wilayah Barlingmascakeb persentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas Tahun 2023 menempati peringkat ke-2 terendah dari 5 kabupaten. Namun dari sisi jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyumas memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi. Jumlah penduduk miskin menurun 3.970 jiwa dari 220.470 jiwa pada tahun 2022 menjadi 216.500 jiwa pada tahun 2023.

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15.

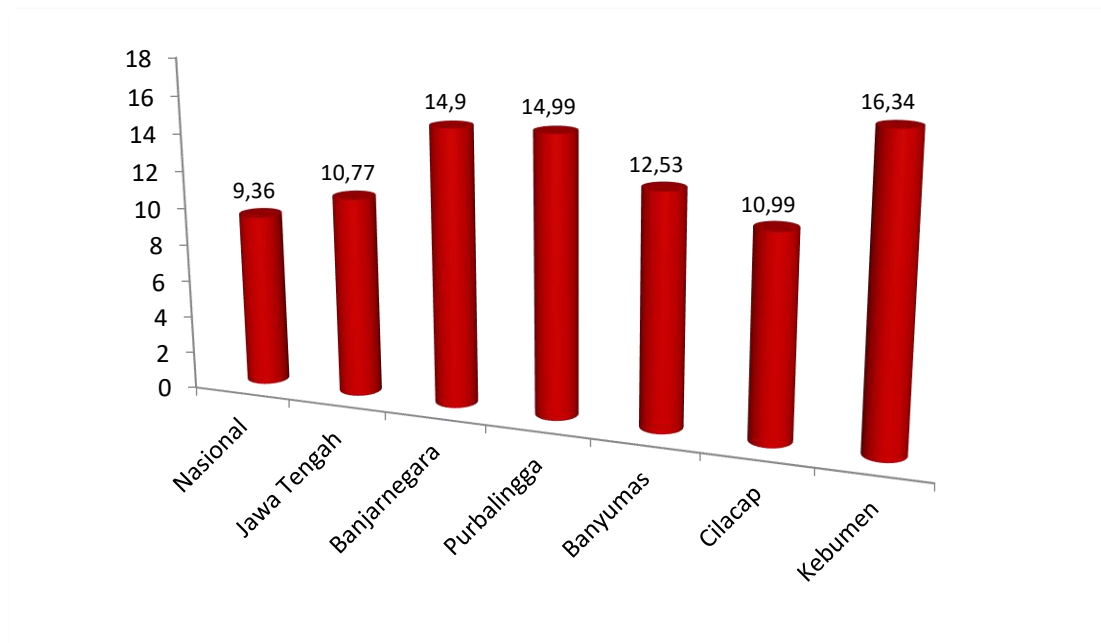
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Provinsi Jawa Tengah	Capaian Nasional	Persentase Kinerja terhadap Capaian Provinsi Jawa Tengah	Persentase Kinerja terhadap Capaian Nasional
Persentase Penduduk Miskin	12,53	10,77	9,36	85,95	74,70

Perbandingan persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2023 sebagai berikut :

Grafik 3.12.

Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Faktor penghambat yang menyebabkan prosentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas dibawah Provisi Jawa Tengah dan nasional antara lain :

- 1) Dampak pandemi COVID-19;
- 2) *Inclusion* dan *exclusion error*
Inclusion error adalah kesalahan karena memasukkan rumah tangga yang tidak miskin ke dalam data.
Exclusion error adalah kesalahan karena tidak memasukkan rumah tangga miskin yang seharusnya masuk ke dalam data.;
- 3) Belum optimalnya sinergi penanganan kemiskinan lintas sektor;
- 4) Belum tertangani pengangguran secara optimal;
- 5) Masih banyaknya masyarakat miskin yang belum mendapat akses pelayanan dasar (Jamban, Sanitasi, Air Bersih dan RTLH).

Pemerintah Kabupaten Banyumas berusaha menangani dampak pandemi COVID-19 dengan upaya pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi untuk pemulihan kondisi kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan. Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem dilakukan melalui konvergensi pemanfaatan anggaran dan konsolidasi program/kegiatan, baik yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran maupun meningkatkan pendapatan, yang menyasar kelompok miskin ekstrem yang tinggal di wilayah-wilayah kantong kemiskinan. Untuk merencanakan kebijakan dan strategi terkait percepatan penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, langkah awal yang harus dilakukan adalah menyusun peta (*mapping*) program/kegiatan dan anggaran terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem, baik yang berasal dari sumber pembiayaan APBN maupun APBD.

Selain upaya diatas, Pemerintah Kabupaten Banyumas di tahun 2023 juga telah melakukan upaya penanggulangan kemiskinan yang lain diantaranya :

- 1) Mengurangi Beban Pengeluaran : Bantuan Penderes, Bantuan Lansia Miskin, Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin, Bea siswa siswa SD dan SMP, Bantuan Makanan Bagi Ibu Hamil Resiko Tinggi;
- 2) Meningkatkan Pendapatan : Pelatihan Usaha/Bantuan Permodalan/ Bantuan sarpras pertanian/peternakan dan Pemberdayaan kelompok usaha;

- 3) Meminimalkan Kantong Kemiskinan : Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih, Pembangunan Infrastruktur Pedesaan melalui bantuan keuangan kepada desa, Optimalisasi Penggunaan Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur Jalan/Jembatan Antar Desa, dan RTLH.

Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 di Kabupaten Banyumas ditargetkan menjadi 0%. Untuk itu di Tahun 2023 ditetapkan desa prioritas kemiskinan ekstrem yang berada di 60 Desa yang tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Banyumas. Upaya penanggulang kemiskinan ekstrem tahun 2023 diantaranya :

- 1) Melaksanakan verval data P3KE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) di 60 (enam puluh) Desa prioritas penanganan kemiskinan ekstrem.
- 2) Menyusun Surat Keputusan Bupati Desa Prioritas Dampungan oleh Perangkat Daerah.
- 3) Fokus intervensi P3KE diarahkan untuk menyelesaikan pemenuhan layanan dasar diantaranya : RTLH, Air Bersih, Listrik, Jamban, Stunting, ATS (Anak Tidak Sekolah), Disabilitas dan Tidak Bekerja.

Tercapainya tujuan meningkatkan pembangunan yang berkeadilan dengan indikator persentase penduduk miskin didukung oleh 11 (sebelas) program dengan total anggaran sejumlah Rp. 268.143.959.495,- dan realisasi sebesar Rp. 231.560.889,- sehingga rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 86,36%. Dari 11 (sebelas) program yang realisasi mencapai lebih dari 80% sebanyak 8 (delapan) program.

Gambar 3.5.

Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Papringan
a.n. Rociman (sebelum diperbaiki)



Sumber : Dinperkim Kab. Banyumas, 2023

Gambar 3.6.

Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Papringan
a.n. Rociman (setelah diperbaiki)



Sumber : Dinperkim Kab. Banyumas, 2023

Gambar 3.7.

Launching Bansos RTLH



Sumber : Dinperkim Kab. Banyumas, 2023

4. TUJUAN 4 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dengan Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dan Non Pertanian

Dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per kapita.

a) Pertumbuhan Ekonomi

Upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi di Kabupaten Banyumas telah mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas. Pada Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas adalah 5,86%, lebih tinggi dari rata-rata nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan nilai tambah terbesar yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas adalah lapangan usaha transportasi dan pergudangan, yakni dengan adanya peningkatan moda transportasi dan pulihnya mobilitas dan daya beli yang mendorong aktivitas ekonomi.

Secara lebih rinci realisasi capaian Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.16.

Capaian Kinerja capaian Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023

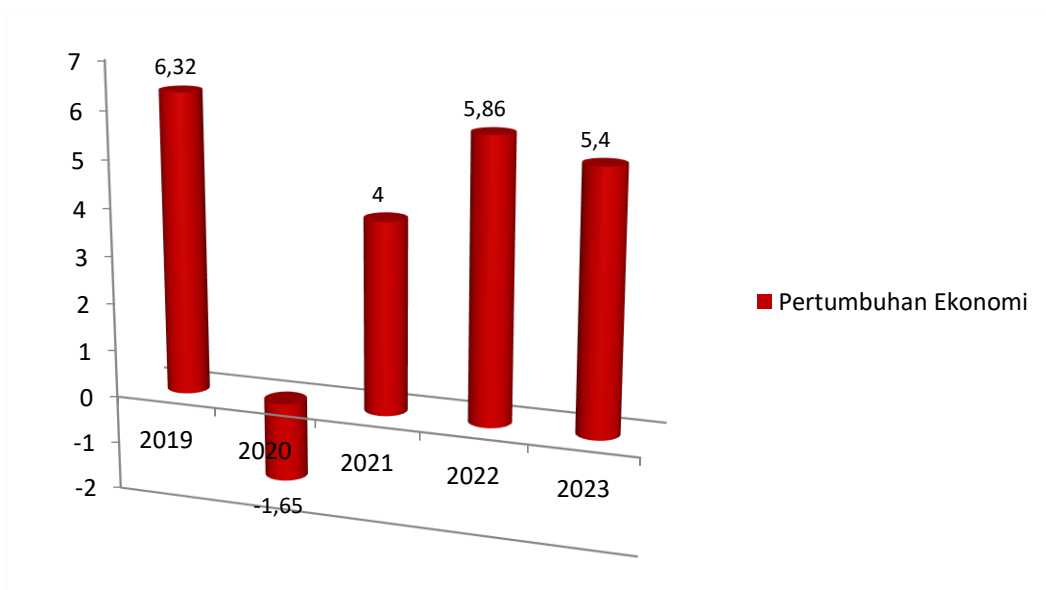
Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023			Target 2023 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d Th 2023
		Target	Realisasi	%		
Pertumbuhan Ekonomi	%	5	5,4	108	5	108

Peningkatan indikator kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas tahun 2023 apabila dibandingkan dengan pencapaian selama kurun waktu tahun 2019-2023 disajikan pada grafik berikut ini :

Grafik 3.13.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas

Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

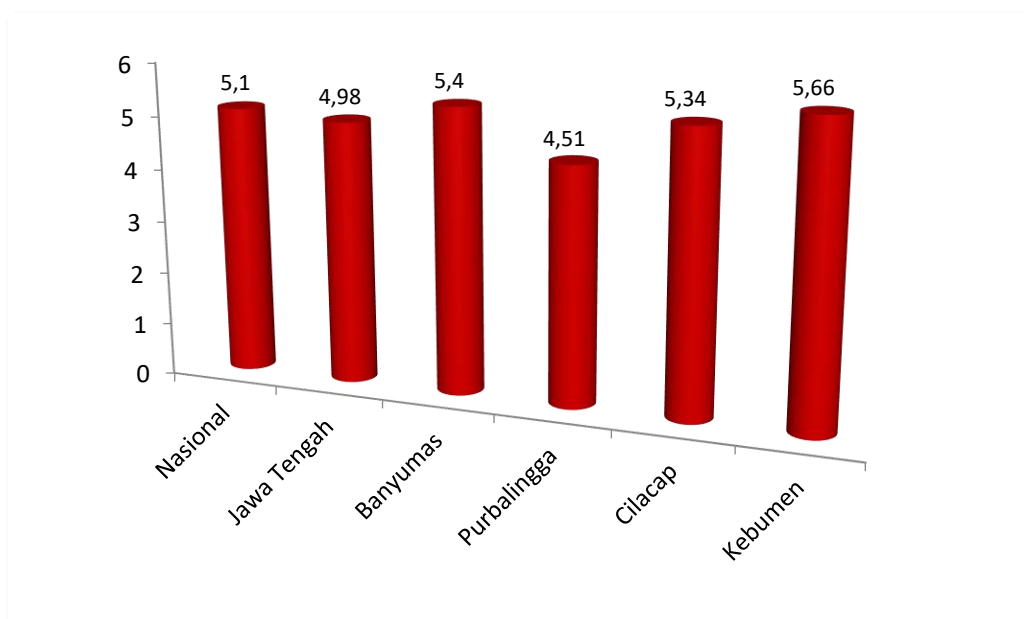
Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Provinsi Jawa Tengah	Capaian Nasional	Persentase Kinerja terhadap Capaian Provinsi Jawa Tengah	Persentase Kinerja terhadap Capaian Nasional
Pertumbuhan Ekonomi	5,4	4,98	5,1	108,43	105,88

Sumber : BPS, 2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas dengan kabupaten di sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan nasional yang disajikan dalam grafik berikut :

Grafik 3.14.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023



Sumber : BPS, 2023

Faktor penghambat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas antara lain :

- 1) Tingginya penduduk miskin;
- 2) Tingginya pengangguran;

- 3) Belum adanya kawasan industri yang dapat menampung banyak tenaga kerja.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu :

- 1) Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 2) Meningkatkan stabilitas keamanan wilayah;
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah;
- 4) Meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan menurunkan risiko bencana;
- 5) Memanfaatkan potensi dan kualitas sumber daya alam.

Laju pertumbuhan PDRB atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas dengan perhitungan PDRB ADHK (Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan) dimana pertumbuhan tertinggi pada Tahun 2023 dicapai oleh penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu sebesar 11,01, dan pertumbuhan terendah ada pada pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu 1,85.

Adapun rincian persentase kontribusi lapangan usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banyumas, tahun 2019 s.d 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.18.

Persentase Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023 (%)

	Sektor PDRB	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,31	1,51	0,94	2,06	1,85
B	Pertambangan dan Penggalian	3,34	-2,21	4,45	0,73	2,12
C	Industri Pengolahan	7,99	-0,05	3,75	4,59	5,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,16	2,55	5,74	4,82	5,94
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,17	4,15	5,66	2,74	4,09
F	Konstruksi	4,30	-3,71	7,62	2,47	3,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,11	-3,70	6,06	4,12	5,81
H	Transportasi dan Pergudangan	7,97	-31,84	2,24	83,70	7,85

	Sektor PDRB	2019	2020	2021	2022	2023
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,76	-7,08	5,61	16,40	11,01
J	Informasi dan Komunikasi	11,74	13,81	4,93	2,11	10,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,29	1,59	1,22	0,58	2,46
L	Real Estate	5,48	-0,37	2,66	5,30	7,04
M,N	Jasa Perusahaan	10,08	-5,26	2,86	6,07	6,94
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,64	-1,34	0,07	1,24	3,83
P	Jasa Pendidikan	8,10	-0,26	0,55	1,36	5,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,28	7,83	1,94	2,72	6,11
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,05	-5,44	0,62	11,94	7,51

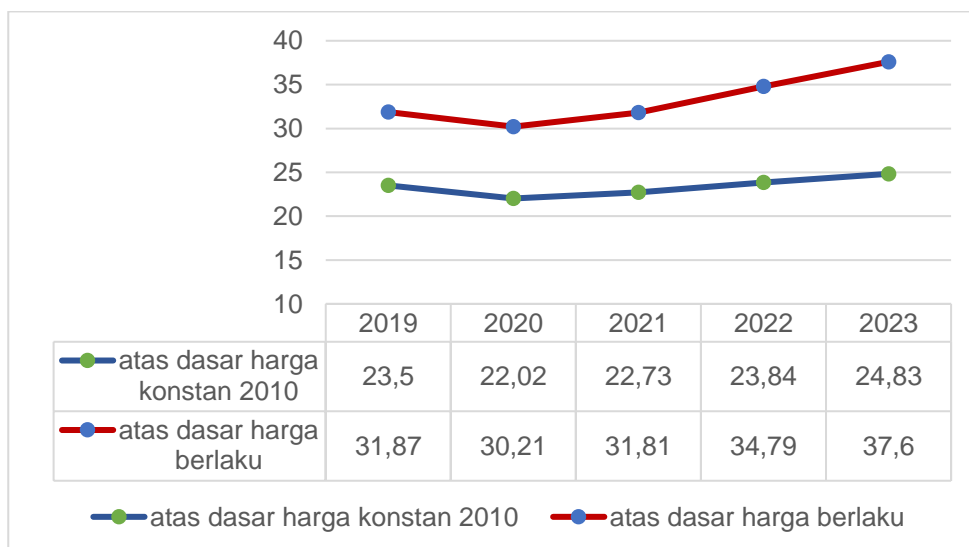
Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2023

b) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

Nilai PDRB per kapita Banyumas atas Dasar Harga Berlaku tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2023 PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku tercatat sebesar Rp.37,6 juta/jiwa. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023, terjadi penurunan dari 2019 ke 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid 19. Sementara untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2023 sebesar 24,83 juta/jiwa. Rincian perkembangan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK tahun 2018-2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Grafik 3.15.

PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Banyumas
Tahun 2019-2023 (juta rupiah)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Secara lebih rinci realisasi capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.19.

Capaian Kinerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita
Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023			Target 2023 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d Th 2023
		Target	Realisasi	%		
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita	Juta rupiah	35,513	37,6	105,88	35,513	105,88

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2024

PDRB Perkapita Kabupaten Banyumas apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20.

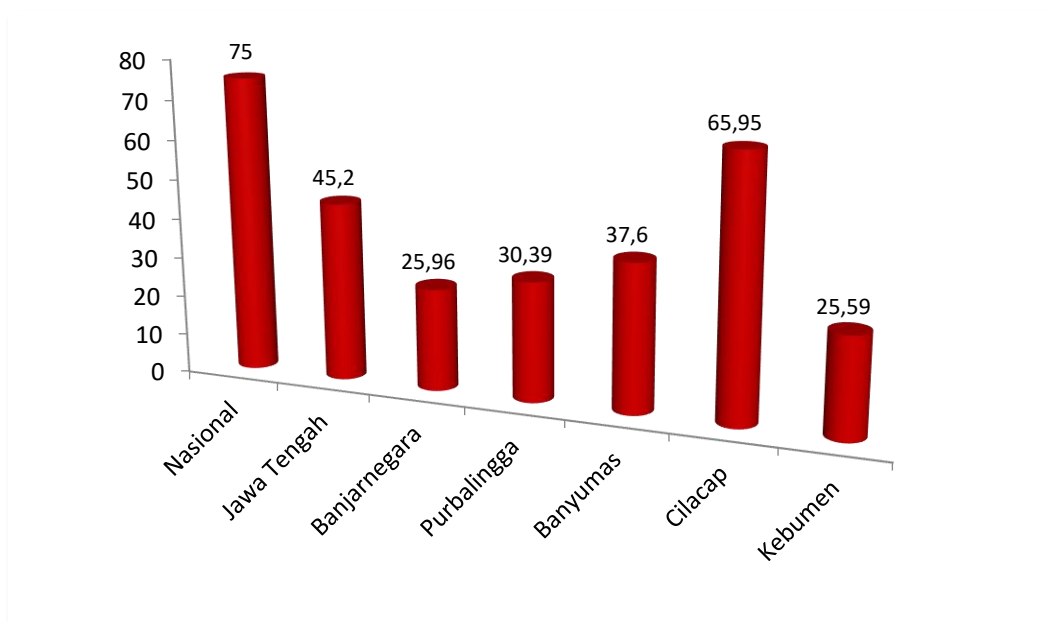
PDRB Perkapita Kabupaten Banyumas Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 (juta rupiah)

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Provinsi Jawa Tengah	Capaian Nasional	Persentase Kinerja terhadap Capaian Provinsi Jawa Tengah	Persentase Kinerja terhadap Capaian Nasional
PDRB Perkapita	37,6	45,20	75	83,19	50,13

Seperti terlihat pada grafik dibawah ini, perbandingan PDRB Perkapita Banyumas dengan kabupaten sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan nasional tahun 2023.

Grafik 3.16.

PDRB per Kapita Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional menurut ADHB Tahun 2023 (juta rupiah)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Produk Domestik Regional Bruto ADHB per Kapita Banyumas Tahun 2023 tertinggi kedua di Barlingmascakeb setelah Cilacap, lebih rendah dibandingkan dengan PDRB per Kapita Jawa Tengah dan nasional.

Faktor penghambat Kabupaten Banyumas dalam pencapaian PDRB perkapita antara lain :

- 1) Tingginya penduduk miskin;
- 2) Tingginya pengangguran;
- 3) Belum maksimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain langkah tersebut diatas, tercapainya tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian didukung oleh 21 program dengan total anggaran sejumlah Rp. 286.127.950.342,- dan realisasi sebesar Rp. 256.383.109.644,- sehingga rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 89,60%. Dari 21 program yang realisasi mencapai lebih dari 80% sebanyak 19 program.

Gambar 3.8.

Penyerahan Dana Pinjaman Bergulir untuk UMKM



Sumber : Humas Kab.Banyumas, 2023

Gambar 3.9.

Pembukaan Pasar Tani



Sumber : Humas Kab.Banyumas, 2023

5. TUJUAN 5 : Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Sektor Agribisnis

Dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis telah ditetapkan indikator berupa Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

Secara lebih rinci realisasi capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.21.

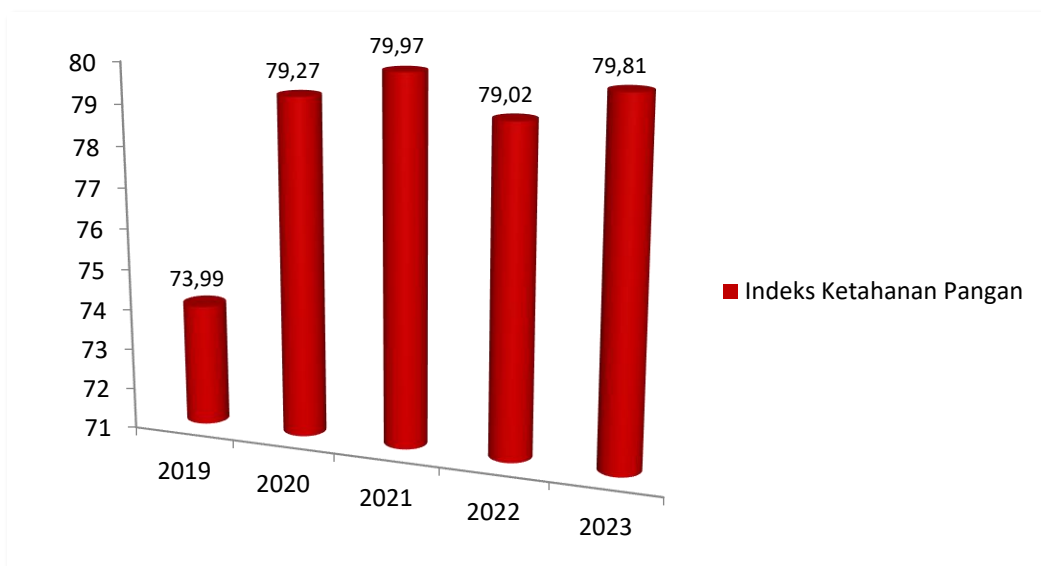
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Sektor Agribisnis Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023			Target 2023 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d Th 2023
		Target	Realisasi	%		
Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	74,04	79,81	107,79	74,04	107,79

Adapun realisasi indikator kinerja Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Banyumas dari Tahun 2019-2023 disajikan dalam grafik berikut ini :

Grafik 3.17.

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023



Sumber : Indeks Ketahanan Pangan, 2019-2023

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

IKP memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Secara khusus, penyusunan IKP dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah, IKP yang disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan intervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasaran.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Banyumas apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.22.

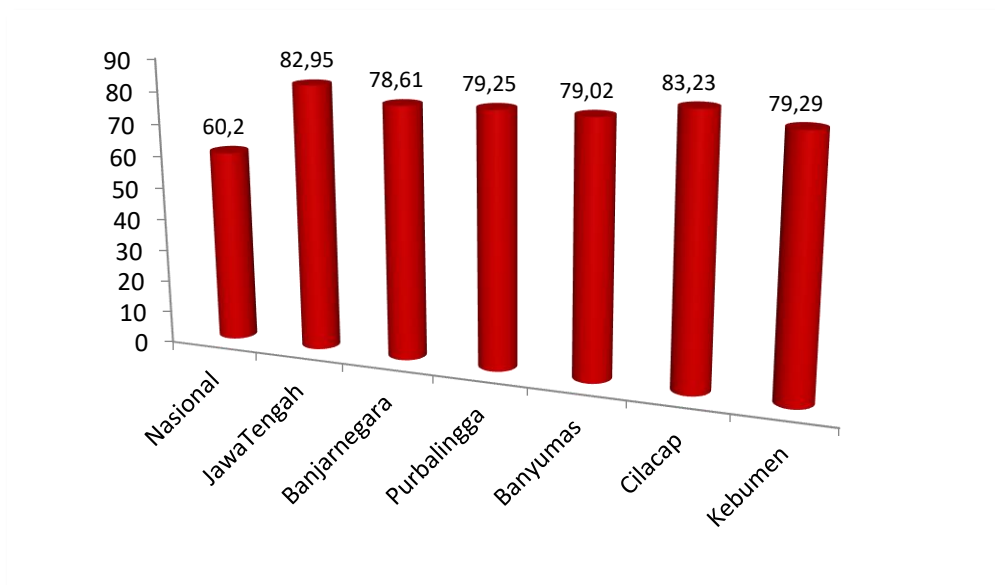
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Banyumas Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional (Indeks Ketahanan Pangan Global/GFSI) Tahun 2022

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Provinsi Jawa Tengah	Capaian Nasional	Persentase Kinerja terhadap Capaian Provinsi Jawa Tengah	Persentase Kinerja terhadap Capaian Nasional
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	79,02	82,95	60,2	95,26	131,26

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) kabupaten di sekitar Kabupaten Banyumas (BARLINGMASCAGEB : Kab. Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen), Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2023 sampai dengan LKjIP ini disusun belum rilis. Grafik berikut ini capaian IKP Kabupaten Banyumas, kabupaten sekitar Banyumas dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022.

Grafik 3.18.

Capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional (Indeks Ketahanan Pangan Global/GFSI) Tahun 2022



Sumber : Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2023

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pencapaian Tujuan Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Sektor Agribisnis

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah, sehingga terus berupaya mendorong peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas. Dukungan sarana dan prasarana produksi pertanian terus diupayakan untuk meningkatkan produksi bahan pangan. Jaringan irigasi dalam kondisi baik menjadi faktor penting untuk peningkatan produksi pertanian tanaman pangan sehingga memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan. Sedangkan untuk mendorong keterjangkauan pangan diupayakan melalui keterjangkauan harga pangan. Dengan didukung sistem produksi yang efisien maka harga bahan pangan hasil produksi pertanian pun diharapkan dapat bersaing dan dijangkau masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun 2024-2026 merencanakan akan menerapkan dan mengembangkan inovasi KAMANDALU (Keterjangkauan, Ketersediaan, Keamanan dan Pemanfaatan Pangan serta ketersediaan Cadangan Pangan melalui Lumbung Pangan) dalam bidang ketahanan pangan melalui sistem terpadu upaya mengentaskan desa rawan pangan di Kab. Banyumas. Sehingga penamaan KAMANDALU menggambarkan upaya inovasi berupa sistem terpadu untuk menyelesaikan isu strategis ketiga yaitu penguatan ketahanan pangan yang ditopang oleh 3 (tiga) aspek utama yaitu: ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.

Hal-hal yang menjadi kendala/permasalahan dalam pencapaian ketahanan pangan dari aspek ketersediaan pangan antara lain :

- 1) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- 2) Skala usaha tani yang kecil dan konversi lahan;
- 3) Adanya dampak perubahan iklim;
- 4) Ketersediaan pangan yang belum merata;
- 5) *Food Loose* yang tinggi;
- 6) Regenerasi petani yang lambat;
- 7) Tantangan dan diseminasi teknologi;
- 8) Belum Optimalnya Sarpras Pendukung dan Pengelolaan Cadangan Pangan.

Hal-hal yang menjadi kendala/permasalahan dalam pencapaian ketahanan pangan dari aspek keterjangkauan pangan antara lain :

- 1) Kurang meratanya distribusi pangan dan keterjangkauan harga pangan;
- 2) Daya beli masyarakat rendah;
- 3) Tingkat kemiskinan tinggi;
- 4) Tidak stabilnya harga pangan.

Hal-hal yang menjadi kendala/permasalahan dalam pencapaian ketahanan pangan dari aspek pemanfaatan pangan antara lain :

- 1) Rendahnya pengetahuan pangan dan gizi;
- 2) Pola konsumsi pangan masyarakat;
- 3) Rendahnya pengetahuan pemanfaatan pangan yang meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan pangan termasuk penggunaan air dan bahan bakar selama proses pengolahannya;
- 4) Rendahnya keamanan pangan yang beredar di masyarakat.

Strategi yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan antara lain:

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
- 3) Meningkatkan diversifikasi pangan;
- 4) Mempromosikan keberagaman pangan terutama pangan lokal sebagai alternatif pangan;
- 5) Mengurangi pemborosan pangan dengan sosialisasi gerakan stop boros pangan;
- 6) Meningkatkan minat generasi muda untuk terjun/bekerja pada sektor pertanian sebagai petani milenial;
- 7) Adaptasi terhadap perubahan teknologi;
- 8) Optimalisasi sarana cadangan pangan untuk menjaga ketersediaan pangan;
- 9) Pembinaan dan pendampingan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) untuk menjaga cadangan pangan ditingkat masyarakat.

Strategi yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan keterjangkauan pangan antara lain:

- 1) Keterjangkauan harga pangan dengan didukung sistem produksi yang efisien maka harga bahan pangan hasil produksi pertanian pun diharapkan dapat bersaing dan dijangkau masyarakat;

- 2) Perluasan akses informasi ketersediaan, pasokan, dan harga pangan;
- 3) Penyaluran pangan bergizi untuk daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana;
- 4) Peningkatan aksesibilitas pangan bagi masyarakat dari wilayah surplus ke wilayah defisit.

Strategi yang dapat dilakukan dalam rangka pemanfaatan pangan antara lain:

- 1) Penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan;
- 2) Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA);
- 3) Peningkatan konsumsi pangan berbasis sumberdaya dan kearifan lokal;
- 4) Pengendalian pemborosan pangan (*food waste*);
- 5) Sosialisasi dan pelatihan pengolahan pangan kepada masyarakat.

Pencapaian tujuan meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) didukung oleh 5 (lima) program dengan total anggaran sejumlah Rp. 243.571.906.287,- dan realisasi sebesar Rp. 215.520.144.997,- sehingga rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 88,48%. Dari ke-5 (lima) program yang mendukung, anggaran masing-masing program dapat terealisasi lebih dari 80%.

Gambar 3.10.

Gerakan Pangan Murah



Sumber : Humas Kab.Banyumas, 2023

Gambar 3.11.

Penyaluran Bantuan Beras Cadangan Pangan



Sumber : Humas Kab.Banyumas, 2023

Gambar 3.12.

Presiden Joko Widodo meninjau kegiatan tanam padi di Kecamatan Kalibagor



6. TUJUAN 6 : Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Strategis yang Berwawasan Lingkungan untuk Perluasan Kesempatan Kerja

Dalam rangka mewujudkan tujuan Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Strategis yang Berwawasan Lingkungan untuk Perluasan Kesempatan Kerja, maka ditetapkan 3 (tiga) indikator yaitu

Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Secara lebih rinci realisasi capaian kinerja Tujuan Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Strategis yang Berwawasan Lingkungan untuk Perluasan Kesempatan Kerja adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.23.

Capaian Kinerja Tujuan Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Strategis yang Berwawasan Lingkungan untuk Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023			Target 2023 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d Th 2023
		Target	Realisasi	%		
Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	%	2	21,72	1.086	2	1.086
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,5	6,35	58,89	4,5	58,89
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	64,15	65,3	101,79	64,15	101,79

Adapun capaian masing-masing indikator dalam rangka mewujudkan Tujuan Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Strategis yang Berwawasan Lingkungan untuk Perluasan Kesempatan Kerja adalah sebagai berikut :

a) Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah

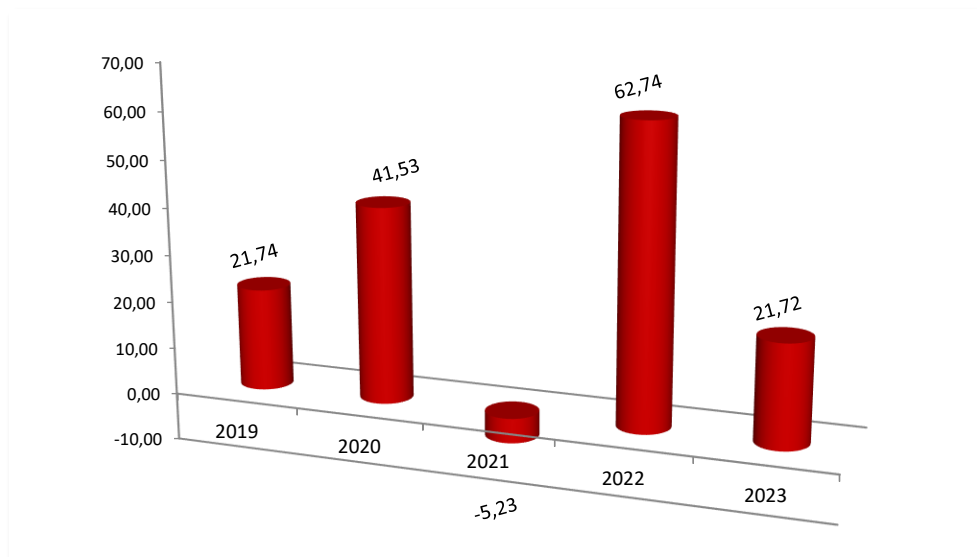
Investasi di daerah menjadi bagian penting dalam upaya pengurangan pengangguran. Keberadaan penanam modal (investor) dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyumas.

Capaian indikator Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dapat dilihat dari pertumbuhan nilai investasi dan pencapaian selama kurun waktu tahun 2019-2023 disajikan pada grafik berikut ini :

Grafik 3.19.

Pertumbuhan Nilai Investasi di Kabupaten Banyumas

Tahun 2019-2023



Sumber : DPMPSTSP Kabupaten Banyumas, 2023

Nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Banyumas kurun waktu 2019–2023 mengalami peningkatan seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.24.

Nilai Investasi di Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023

Uraian	Nilai Investasi				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Investasi (Rp)	761.621.384.575	1.077.955.780.000	1.021.561.268.294	1.637.794.413.503	1.993.592.123.178,64

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Pertumbuhan nilai investasi Kabupaten Banyumas apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

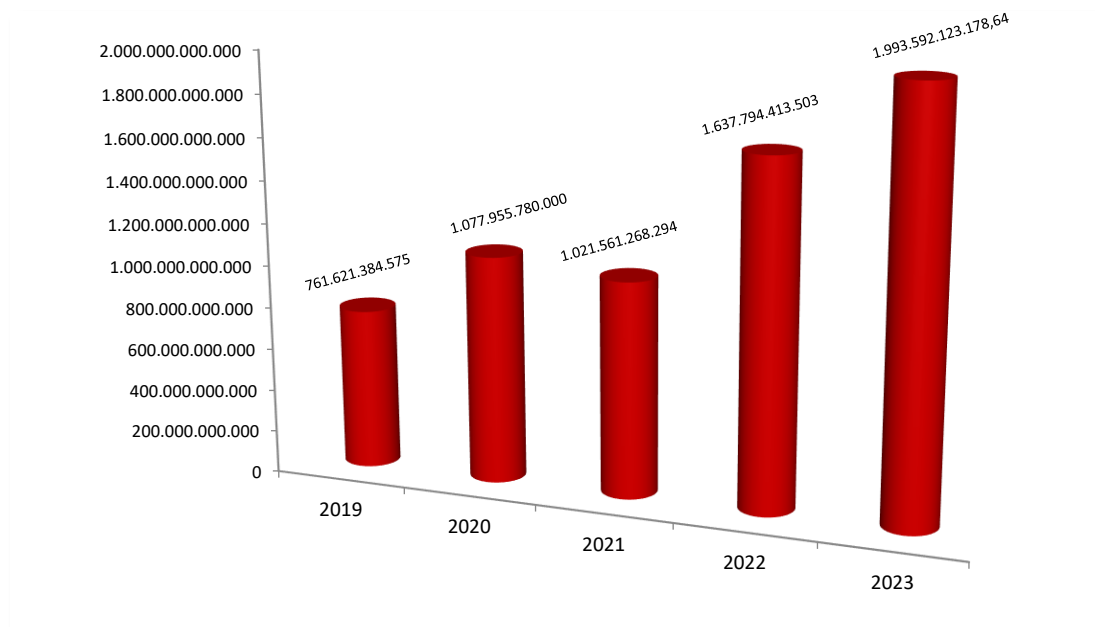
Tabel 3.25.

Pertumbuhan nilai investasi Kabupaten Banyumas Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Provinsi Jawa Tengah	Capaian Nasional	Persentase Kinerja terhadap Capaian Provinsi Jawa Tengah	Persentase Kinerja terhadap Capaian Nasional
Pertumbuhan nilai investasi	21,72	12,56	17,5	172,93	124,11

Grafik 3.20.

Nilai Investasi di Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023



Sumber : DPMPTSP Kabupaten Banyumas, 2023

Nilai investasi tahun 2023 yaitu Rp. 1.993.592.123.178,64, sudah melebihi target yang ditetapkan pada RPJMD 2018-2023 yaitu sebesar Rp 600 miliar. Pencapaian ini juga melampaui target investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebesar Rp 1 triliun.

Pencapaian realisasi investasi pada Tahun 2023 terdiri dari sektor primer (pertanian dan pengolahan hasil pertanian), sektor sekunder (kontruksi, industri dan pertambangan) serta sektor tersier (hotel, restoran, pergudangan, perdagangan dan jasa). Pencapaian investasi terbesar pada sektor tersier dengan nilai investasi sebesar Rp

1.600.422.291.346,73 dari total investasi sebesar Rp 1.993.592.123.178,64. Nilai capaian investasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.26.

Jumlah Realisasi Investasi berdasarkan sektor Tahun 2023

NO.	SEKTOR	PMA	PMDN	JUMLAH
1	Sektor Primer	-	32.450.650.000	32.450.650.000
2	Sektor Sekunder	121.173.405.028,91	239.545.776.803	360.719.181.831,91
3	Sektor Tersier	19.364.298.952,73	1.581.057.992.394	1.600.422.291.346,73
JUMLAH		140.537.703.981,64	1.853.054.419.197	1.993.592.123.178,64

Sumber : DPMPSTP, 2023

Untuk meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Banyumas telah dilakukan pengembangan lapak pelayanan publik melalui Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Program pelayanan ini menyediakan penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai standar pelayanan. Pada pelaksanaannya, Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal menghadapi kendala yang menghambat penerbitan perizinan dan non perizinan yaitu :

- 1) Terdapat akses layanan yang belum memadai;
- 2) Masih adanya pengaduan berulang dari masyarakat.

Selain itu, gerai pelayanan publik pada Mall Pelayanan Publik pada tahun 2023 melayani 1.520 jenis perizinan yang terdiri atas 85 Perizinan Non OSS, 1.295 Perizinan OSS dan 140 pelayanan dari gerai Instansi/Perangkat Daerah.

Selain upaya diatas, ada beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan investasi, yaitu :

- 1) Optimalisasi penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) oleh pelaku usaha secara berkala;
- 2) Fasilitasi kemudahan perizinan berusaha terhadap pelaku usaha terutama skala menengah dan besar;

- 3) Melaksanakan promosi investasi dengan berbagai inovasi agar dapat menarik investor baru untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Banyumas;
- 4) Fasilitasi terhadap pelaku usaha yang mengalami permasalahan perizinan berusaha.

Gambar 3.13.
DPMPTSP Kabupaten Banyumas mengikuti Pameran Investasi Jakarta



Sumber : DPMPTSP, 2023

Gambar 3.14.
Sosialisasi Perizinan Berusaha



Sumber : DPMPTSP, 2023

b) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka terdiri dari :

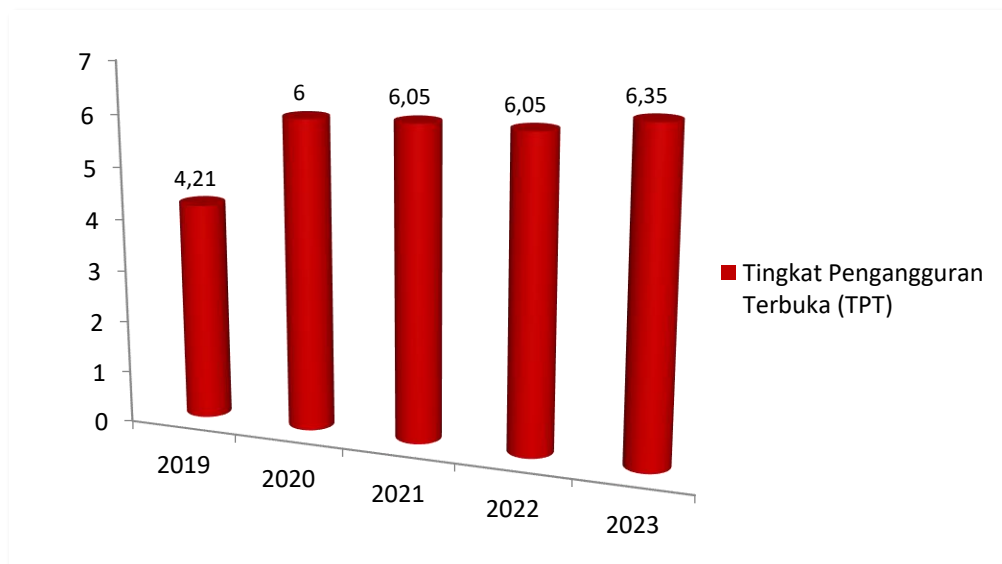
- 1) Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- 2) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
- 3) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
- 4) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja

Pengangguran terbuka umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Banyumas memerlukan perhatian serius semua pihak termasuk keterlibatan dunia usaha dan institusi pendidikan.

Capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyumas Tahun 2023 selama kurun waktu tahun 2019-2023 disajikan pada grafik berikut ini :

Grafik 3.21.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyumas apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.27.

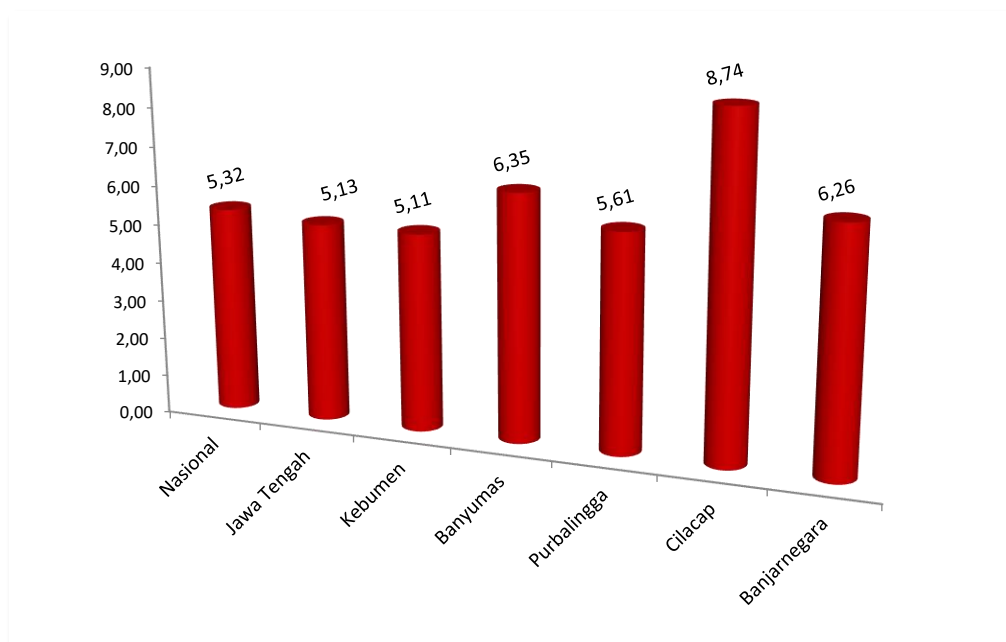
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyumas Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Provinsi Jawa Tengah	Capaian Nasional	Persentase Kinerja terhadap Capaian Provinsi Jawa Tengah	Persentase Kinerja terhadap Capaian Nasional
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,35	5,13	5,32	80,79	83,78

Capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan nasional adalah sebagai berikut :

Grafik 3.22.

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023



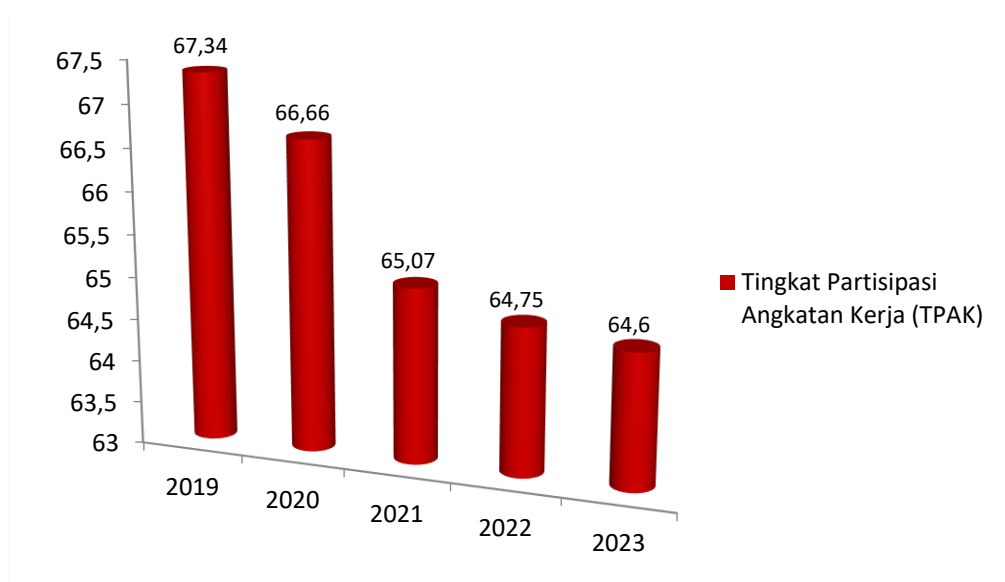
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran salah satunya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK berguna untuk melihat

potensi penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan tenaga kerja (labor supply) untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. TPAK Kabupaten Banyumas pada periode 2019 hingga 2023 menunjukkan angka yang cenderung menurun, sebagaimana grafik berikut:

Grafik 3.23.

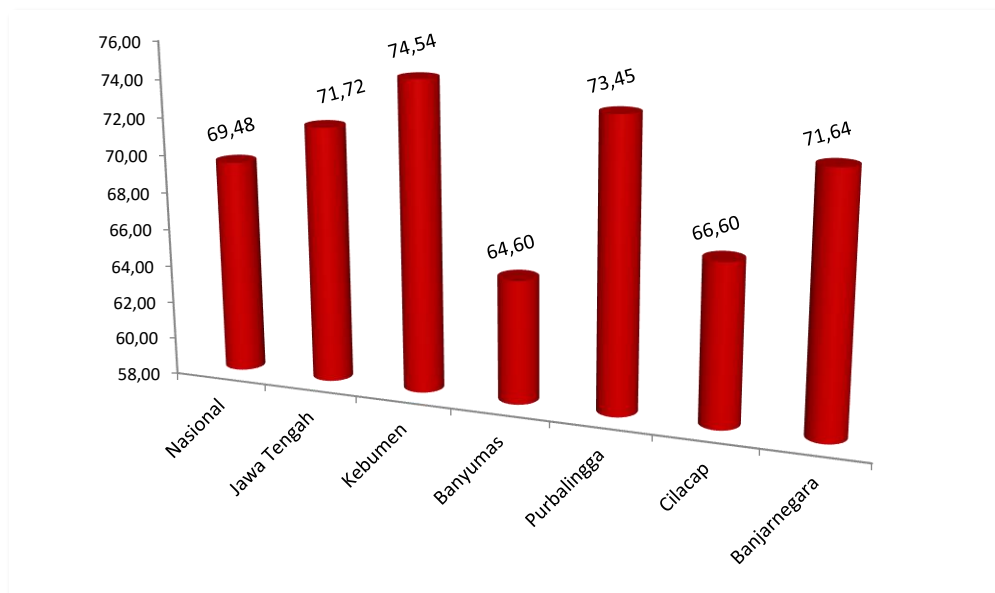
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Banyumas Tahun 2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Grafik 3.24.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan
Nasional Tahun 2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Dalam rangka mengatasi tingkat pengangguran terbuka, maka upaya Pemerintah Kabupaten Banyumas yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi sebanyak 26 (dua puluh enam) kali pelatihan dengan berbagai macam pelatihan seperti memasak, pembuatan hantaran, barista, menjahit, las, dan otomotif;
- 2) Fasilitasi sertifikasi juru sembelih halal;
- 3) Pelaksanaan *Job Fair Hybrid*;
- 4) Mendorong terlaksananya *Job Fair* di Bursa Kerja Khusus di satuan pendidikan SMK dan Perguruan Tinggi;
- 5) Sosialisasi ketenagakerjaan;
- 6) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;

Sedangkan upaya Pemerintah Kabupaten Banyumas yang akan dilakukan dalam rangka mengatasi tingkat pengangguran terbuka adalah sebagai berikut:

- 1) Memperluas jangkauan pelatihan berbasis kompetensi untuk peningkatan kompetensi pencari kerja di seluruh Kabupaten Banyumas;

- 2) Mempersiapkan tenaga kerja mandiri dengan pengembangan kemampuan dan keterampilan berwirausaha;
- 3) Melakukan *Job Canvassing* dan *Job Matching* dengan mengunjungi perusahaan untuk memaksimalkan pelaksanaan *Job Fair Hybrid* tahun 2024;
- 4) Penguatan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja secara prosedural.

Gambar 3.15.

Pelaksanaan Kegiatan Job Fair Hybrid 2023



Sumber : Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas, 2023

Gambar 3.16.

Pelatihan Barista di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Banyumas



Sumber : Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas, 2023

c) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas ditunjukkan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup pada suatu wilayah dengan periode waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKLH telah dikembangkan sejak Tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

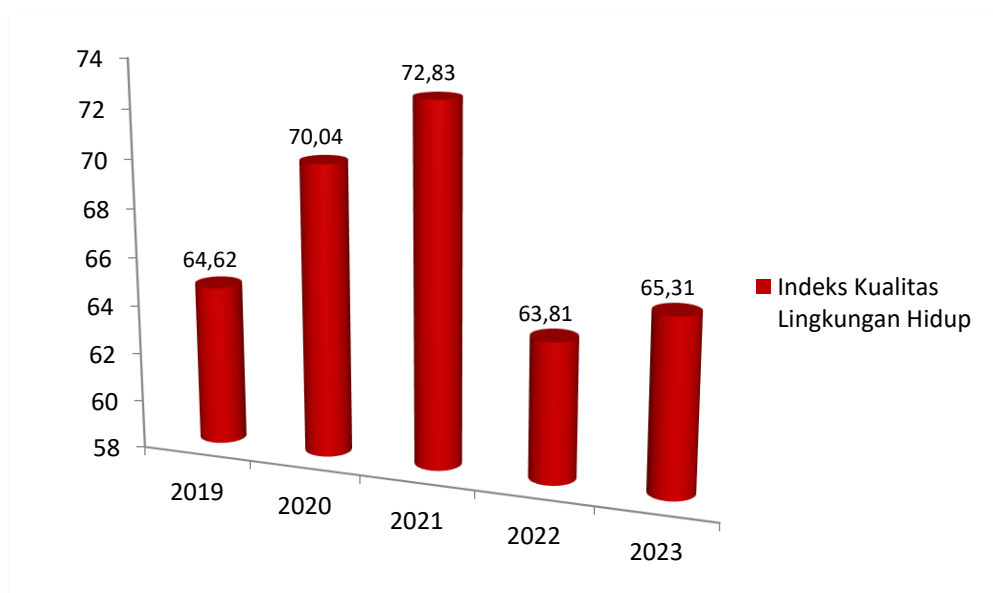
Indeks Kualitas Air (IKA) diperoleh berdasarkan hasil analisis data kualitas air yang terdapat atau melewati suatu wilayah. Pemantauan kualitas air di Kabupaten Banyumas dilakukan pada 30 (tiga puluh) titik yang berada di 6 (enam) sungai dan ordo-ordo sungai yang diperkirakan mampu mewakili keseluruhan kualitas air sungai di Kabupaten Banyumas. Selain itu, terdapat 4 (empat) titik lokasi yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan 2 (dua) lokasi ONLIMO yang menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengujian kualitas air dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. ONLIMO adalah sistem pemantauan kualitas air secara online dan realtime menggunakan unit sensor yang terintegrasi dengan data logger, transmisi data dan sistem database untuk pengelolaan data pemantauan.

Pada tahun 2023, Nilai IKA Kabupaten Banyumas sebesar 51,79 (Status SEDANG), Nilai IKU sebesar 87,45 (Kategori BAIK), sedangkan Nilai IKTL sebesar 47,59 (Kategori KURANG). Hasil kalkulasi dari ketiga indeks tersebut menghasilkan Nilai IKLH 2023 Kabupaten Banyumas sebesar **65,31 (Predikat SEDANG)**.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2019-2023 disajikan pada grafik berikut ini :

Grafik 3.25.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banyumas
Tahun 2019-2023



Sumber : DLH Kabupaten Banyumas, 2023

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banyumas apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

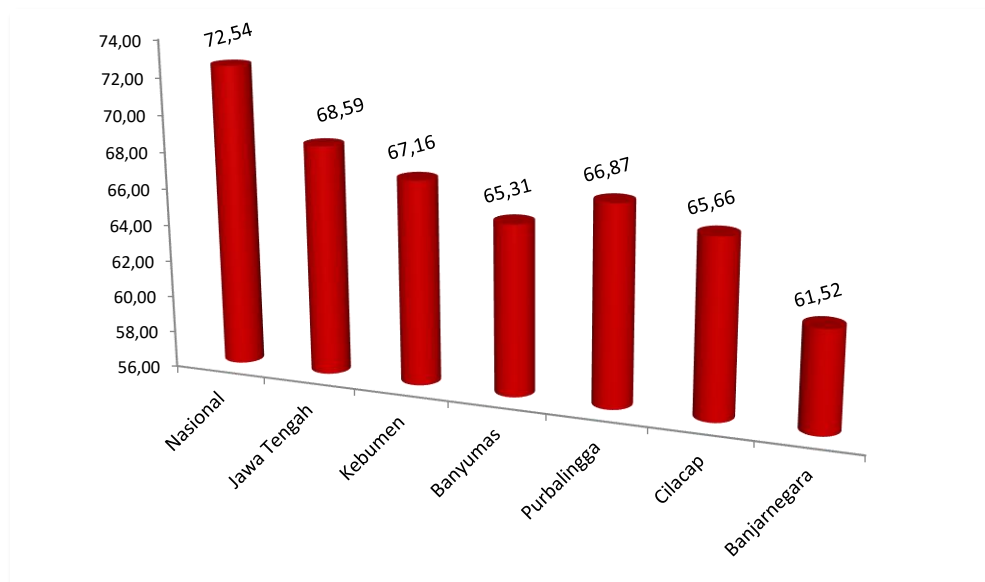
Tabel 3.28.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banyumas Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Provinsi Jawa Tengah	Capaian Nasional	Persentase Kinerja terhadap Capaian Provinsi Jawa Tengah	Persentase Kinerja terhadap Capaian Nasional
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,31	68,59	72,54	95,22	90,03

Grafik 3.26.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023



Sumber : DLH Kabupaten Banyumas, 2023

Faktor penghambat yang menyebabkan IKLH Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam kategori Sedang antara lain :

- 1) Kondisi air permukaan di wilayah Kabupaten Banyumas mengalami pencemaran dengan tingkat pencemaran sedang yang berasal dari aktifitas domestik manusia;
- 2) Kabupaten Banyumas mengalami kesulitan dalam penambahan kuantitas RTH karena ketersediaan lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang minim dan kompetisi penggunaan lahan dengan kepentingan ekonomi;
- 3) Mengalami musim kemarau yang cukup panjang sehingga ada beberapa lokasi titik pantau air permukaan yang mengering dan tidak dapat diambil sampel airnya untuk dianalisa.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) antara lain sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi berkelanjutan terutama menyadarkan masyarakat yang masih buang limbah domestik/sampah ke sungai dan menggalakkan *Open Defecation Free (ODF)*.

- 2) Perbaiki secara kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui ekomodifikasi dan penyediaan RTH privat pada permukiman maupun kawasan jasa perdagangan.
- 3) Pengelolaan sampah dilakukan secara komperhensif dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.
- 4) Kebijakan-kebijakan pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas seperti penanaman pohon, pembuatan jalur sepeda, penetapan *Car Free Day* (CFD) pada hari tertentu.
- 5) Melaksanakan Program Kali Bersih untuk upaya pengendalian pencemaran air, Program Langit Biru untuk pengendalian pencemaran udara, dan Program Indonesia Hijau untuk pengendalian alih fungsi lahan.
- 6) Kewajiban kendaraan untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Gambar 3.17.

Kegiatan *World Clean Day* yang dipimpin oleh Pj. Bupati Banyumas



Sumber : Humas Kabupaten Banyumas, 2023

Selain upaya tersebut diatas, pencapaian tujuan perwujudan Kawasan peruntukan industri dan Kawasan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja dengan indikator Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) didukung oleh 20 (dua puluh) program dengan total anggaran sejumlah Rp.

252.879.576.567,- dan realisasi sebesar Rp. 223.398.495.988,- sehingga rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 88,34%. Dari 20 (dua puluh) program yang realisasi mencapai lebih dari 80% sebanyak 16 (enam belas) program.

7. TUJUAN 7 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan tujuan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat telah ditetapkan 1 (satu) indikator yaitu Persentase Kinerja Infrastruktur.

Secara lebih rinci realisasi capaian kinerja Tujuan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.29.

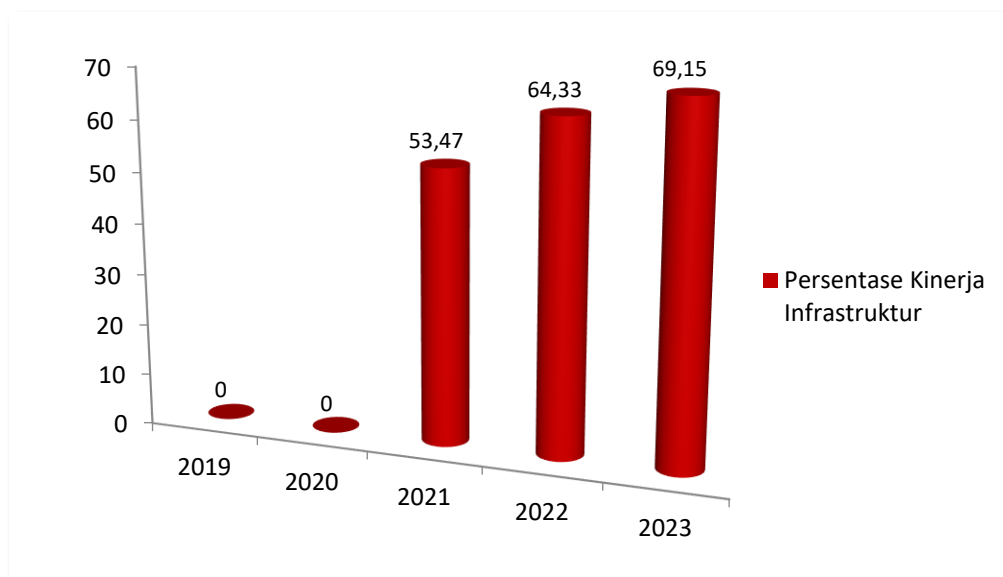
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023			Target 2023 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d Th 2023
		Target	Realisasi	%		
Persentase Kinerja Infrastruktur	%	78,87	69,15	87,68	78,87	87,68

Persentase Kinerja Infrastruktur Kabupaten Banyumas pencapaian selama kurun waktu tahun 2019-2023 disajikan pada grafik berikut ini :

Grafik 3.27.

Persentase Kinerja Infrastruktur Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023



Sumber : Aplikasi e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Penyediaan infrastruktur diupayakan untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan memberikan dukungan kegiatan ekonomi. Komponen Kinerja Infrastruktur tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a) Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap, Irigasi, dan Sistem Drainase

Pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sampai dengan Tahun 2023 terus berupaya meningkatkan kondisi jalan di Kabupaten Banyumas. Peningkatan kondisi jalan menjadi prioritas untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat, menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Kondisi jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banyumas pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.30.

Kondisi Infrastruktur Jalan Kabupaten Banyumas Tahun 2023

Kondisi	Panjang	%	Kondisi		
Baik	665,429	50,59	950,841	72,29%	Mantap
Sedang	285,412	21,70			
Rusak ringan	206,427	15,69	364,506	27,71%	Tidak Mantap
Rusak berat	158,079	12,02			
Jumlah	1.315,347	100,00	1.315,347	100,00	

Sumber : DPU Kabupaten Banyumas, 2023

Secara rinci panjang jalan Kabupaten Banyumas dari tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.31.

Panjang Jalan Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023

Uraian	Capaian Kinerja Setiap Tahun (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Panjang jalan kabupaten	1.508	1.508	1.508	1.508	1.315,347
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	37,87	47,51	51,11	57,60	50,59
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang (%)	25,83	28,76	28,66	23,65	21,70
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan (%)	19,39	9,79	10,03	9,95	15,69
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat (%)	16,91	13,93	10,20	8,80	12,02

Sumber : DPU Kabupaten Banyumas, 2023

Faktor yang menghambat dalam meningkatkan kondisi jalan di Kabupaten Banyumas antara lain :

- 1) Peningkatan beban volume lalu lintas;
- 2) Sistem drainase yang tidak baik;
- 3) Kondisi tanah yang tidak stabil/bergelombang;
- 4) Proses pelaksanaan pekerjaan yang kurang sesuai dengan spesifikasi.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan kondisi jalan antara lain :

- 1) Melaksanakan perbaikan rutin;
- 2) Melaksanakan pemeliharaan rutin;
- 3) Penyempurnaan sistem drainase;
- 4) Pengawasan terhadap proses pelaksanaan pekerjaan.

Kondisi infrastruktur irigasi Kabupaten Banyumas pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.32.

Kondisi Infrastruktur Jalan Kabupaten Banyumas Tahun 2023

Jaringan Irigasi	Kondisi Jaringan Irigasi (m)				Jumlah
	Baik		Rusak Ringan		
	Panjang	%	Panjang	%	
Saluran Primer	304.698	77,52	88.368	22,48	393.066
Saluran Sekunder	236.654	86,73	36.220	13,27	272.864
Jumlah	541.343	81,29	124.588	18,71	665.930

Sumber : DPU Kabupaten Banyumas, 2023

Gambar 3.18.

Peningkatan Jalan Rawaheng - Randegan Kecamatan Wangon



Sumber : DPU Kabupaten Banyumas, 2023

Drainase adalah salah satu sarana pelengkap yang biasanya terletak pada ruas jalan. Drainase ini berfungsi untuk mengalirkan air menggenang yang biasanya mengganggu pengguna jalan ketika berkendara, sehingga jalan tetap kering.

Gambar 3.19.

Pembangunan Drainase di Kelurahan Kober



Sumber : Dinperkim Kabupaten Banyumas, 2023

Faktor yang menghambat terkait drainase di Kabupaten Banyumas antara lain :

- 1) Masih adanya masyarakat yang membuang sampah dialiran irigasi;
- 2) Permukiman di bantaran sungai dan di atas saluran drainase;
- 3) Pengambilan air tanah yang berlebihan yang menyebabkan terjadinya penurunan lahan;
- 4) Bangunan persilangan yang tidak terencana dengan baik seperti adanya pipa PDAM, pipa telpon dan listrik yang melintang di penampang basah saluran.

Terkait drainase, Kabupaten Banyumas melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan genangan di jalan. Mulai dari pemasangan peresapan air di jalan-jalan, pemasangan grill, manhole dan lain-lain. Selain itu, juga banyak pembangunan sistem drainase, rehabilitasi saluran drainase, serta pemeliharaan.

Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pekerjaan Umum tidak bosan-bosan untuk terus mengimbau dan melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, terlebih di saluran air ataupun sungai dan taat terhadap

aturan Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS), sehingga akan memudahkan pemeliharaan dan antisipasi sumbatan saluran yang menyebabkan banjir juga menghindari kawasan kumuh termasuk tidak membahayakan penghuni pinggir sungai.

b) Rumah tangga pengguna air bersih dan rumah tangga bersanitasi

Berdasarkan data monitoring dan evaluasi capaian kinerja kunci Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sampai dengan Tahun 2023 rumah tangga berakses sanitasi di Kabupaten Banyumas baru mencapai 92%. Capaian tersebut hanya berdasarkan akses jamban yang merupakan bagian kecil dari sistem pengelolaan air limbah.

Tabel 3.33.

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dan Rumah Tangga Bersanitasi
Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	338.223	343.147	343.987	351.306	354.534
2.	Persentase rumah tangga memiliki akses air bersih (%)	74,49%	75,45%	75,51%	76,99%	77,57%
3.	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	87,79%	88,45%	88,83%	90,00%	92,00%

Sumber : Dinperkim Kabupaten Banyumas , 2023

Berdasarkan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyumas 2023 yang disusun dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2023 sebanyak 93,38% rumah tangga di Kabupaten Banyumas telah memiliki rumah. Meskipun tingkat kepemilikan rumah

tinggi, dari aspek kelayakan masih terdapat rumah tidak layak huni dan rumah tanpa akses air minum dan sanitasi.

Tingginya penduduk miskin merupakan akar permasalahan tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Banyumas. Penanganan RTLH, yang merupakan Cikal Bakal Rumah Layak Huni pada tahun 2023 telah ditangani sebanyak 2.486 rumah, yang terbagi dalam beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut :

- 1) 135 unit dari APBD Kab (Bansos);
- 2) 1234 unit dari BSPS;
- 3) 770 unit dari APBD Prov;
- 4) 100 unit dari Swasta (CSR);
- 5) 72 unit dari APBD Desa;
- 6) 11 Unit dari Filantropi OPD;
- 7) 40 unit dari (BAZNAS Prov);
- 8) 124 unit dari (BAZNAS Kabupaten).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, definisi rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cermin harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. Perkembangan rasio rumah layak huni dan lingkungan kumuh perkotaan yang ditangani Kabupaten Banyumas tahun 2019-2023 selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 3.34.

Perkembangan Rasio Rumah Layak Huni dan Lingkungan Kumuh
Perkotaan Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio rumah layak huni (%)	78,47	78,76	79,17	79,39	80,10
2.	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10Ha di Kab/Kota yang ditangani (%)	N/A	N/A	6,12	5,75	12,18

Sumber : Dinperkim Kabupaten Banyumas, 2023

Faktor yang menghambat dalam meningkatkan rasio rumah layak huni di Kabupaten Banyumas antara lain :

- 1) Belum memanfaatkan secara maksimal kolaborasi *multistakeholder*;
- 2) Minimnya anggaran untuk program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berasal dari APBD.

Upaya untuk meningkatkan rasio rumah layak huni melalui penanganan RTLH di Kabupaten Banyumas dilaksanakan dengan kolaborasi kegiatan dan pendanaan oleh Pemerintah Daerah dan *stakeholder* terkait, melalui CSR ataupun APBN Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan APBD Provinsi Jawa Tengah (Bankeuprov) serta pendanaan dari BAZNAS dan LAZISNU, dan dengan melibatkan seluruh pegawai pada Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Banyumas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 465.3/626 Tahun 2023 tentang Desa Prioritas Dampungan Oleh Perangkat Daerah Dalam Rangka Akselerasi Penurunan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas.

Gambar 3.20.

Pj. Bupati Banyumas Menyerahkan Bantuan Bedah Rumah



Sumber : Sumber : Dinperkim Kabupaten Banyumas, 2023

c) Sarana Perhubungan

Untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Banyumas yang berdaya saing diperlukan peningkatan kualitas pelayanan transportasi. Transportasi merupakan salah satu mata jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang secara dinamis dan berperan dalam menunjang perkembangan pembangunan. Peningkatan layanan transportasi yang aman dan nyaman dapat dilakukan dengan meningkatkan sarana dan prasarana perlengkapan jalan serta mengoptimalkan pelayanan penumpang di terminal tipe C. Transportasi semakin vital peranannya sejalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakatnya.

Penyediaan angkutan umum merupakan salah satu kewenangan kabupaten/kota dalam sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan. Sebagai dasar penyelenggaraan penyediaan angkutan Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota. Untuk meningkatkan pelayanan transportasi dan meningkatkan konektivitas wilayah Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Perhubungan mengembangkan angkutan sungai dan angkutan massal perkotaan melalui program *Buy The Service* (BTS). Program *Buy The Service* (Pembelian Layanan) untuk angkutan massal perkotaan dilakukan dengan membeli layanan angkutan massal perkotaan kepada operator dengan mekanisme lelang berbasis standar pelayanan minimal atau *quality licensing* bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan.

Untuk mendukung penyelenggaraan angkutan sungai dilaksanakan pembangunan dermaga/halte Sungai Serayu. Penyelenggaraan angkutan sungai merupakan upaya pemanfaatan potensi Sungai Serayu sebagai jalur transportasi. Pembangunan dermaga ini diperoleh dari hibah pemerintah untuk pengembangan angkutan sungai. Pengembangan angkutan sungai didasarkan pada kajian Penyusunan SID (Survey Investigasi Desain) Pengembangan Prasarana di Sungai Serayu Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Berdasarkan kajian tersebut direncanakan prasarana berupa 1 (satu) pelabuhan dan 3 (tiga) halte sungai untuk pengembangan angkutan di Sungai Serayu. Selain untuk memberikan alternatif moda transportasi,

angkutan sungai menjadi dukungan bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyumas. Sampai dengan Tahun 2023 telah dibangun 2 (dua) halte Sungai Serayu, yaitu di Desa Tambaknegara Kecamatan Rawalo, dan Desa Papringan Kecamatan Banyumas.

Faktor penghambat dalam pemenuhan sarana perhubungan di Kabupaten Banyumas antara lain :

- 1) Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan yang belum optimal;
- 2) Rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum;
- 3) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana konektivitas
Masih terdapat wilayah yang belum dilayani trayek angkutan yaitu Kecamatan Tambak, Sumpiuh, Kemranjen, Somagede, dan Kecamatan Kalibagor.
- 4) Banyaknya titik rawan kecelakaan (*blackspot*)
Pada *blackspot* baik di ruas jalan kabupaten, jalan provinsi, maupun jalan nasional di Kabupaten Banyumas menjadi penyebab banyaknya kecelakaan lalu lintas.
- 5) Kurangnya kualitas sarana dan prasarana konektivitas
Sarana dan prasarana Terminal Tipe C di Kabupaten Banyumas masih belum memenuhi standar pelayanan minimal terminal angkutan penumpang.
- 6) Belum disusunnya dan ditetapkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Upaya dalam pemenuhan sarana perhubungan di Kabupaten Banyumas antara lain :

- 1) Pengembangan sarana prasarana
seperti penambahan halte bagi para calon penumpang *Bus Rapid Transit* (BRT) supaya para calon penumpang merasa aman, nyaman dalam menunggu BRT.
- 2) Sistem pengaturan lalu lintas dengan menggunakan Program ATCS (*Area Traffic Control System*) di beberapa titik simpang;
- 3) Dibangunnya Taman Edukasi Keselamatan Transportasi Darat untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan;
- 4) Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
- 5) Pemberlakuan kewajiban uji kelayakan kendaraan bermotor.

Gambar 3.21.
Halte Sungai



Sumber : Sumber : Dinhub Kabupaten Banyumas, 2023

Gambar 3.22.
Terminal Ajibarang



Sumber : Sumber : Dinhub Kabupaten Banyumas, 2023

Tercapainya tujuan meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dengan indikator Persentase Kinerja Infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat didukung oleh 12 (dua belas) program dengan total anggaran sejumlah Rp. 480.479.955.726,- dan

realisasi sebesar Rp. 434.977.662.970,- sehingga rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 90,53%. Dari ke-12 (dua belas) program yang mendukung, anggaran masing-masing program dapat terealisasi lebih dari 80% sebanyak 11 (sebelas) program.

8. TUJUAN 8 : Menumbuhkan dan Mengembangkan Daya Tarik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka mewujudkan tujuan menumbuhkan dan Mengembangkan Daya Tarik Pariwisata dan Ekonomi telah ditetapkan indikator berupa Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Potensi pariwisata di Kabupaten Banyumas cukup banyak dan beragam. Pada umumnya, lokawisata di Kabupaten Banyumas mudah dijangkau karena telah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyumas, disusun kajian *One District One Destination* (ODOD) yaitu konsep pengembangan pariwisata berbasis kawasan serta kajian Revitalisasi Kota Lama Banyumas. Lebih lanjut, Kabupaten Banyumas juga telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyumas (RIPPARKAB) Tahun 2018-2033 yang menetapkan Perwilayahan Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP).

Secara lebih rinci realisasi capaian kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.35.

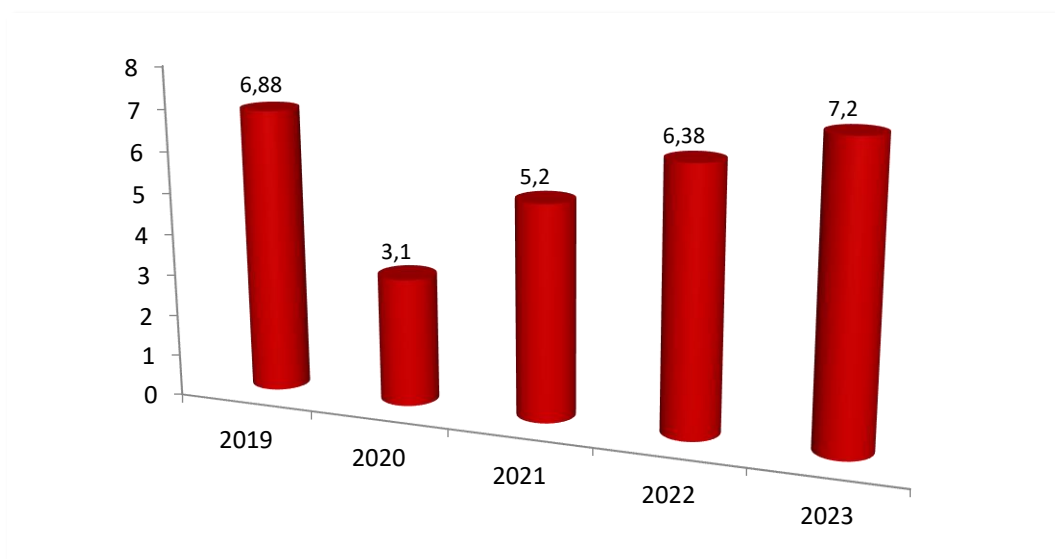
Capaian Kinerja Tujuan Menumbuhkan dan Mengembangkan Daya Tarik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023			Target 2023 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d Th 2023
		Target	Realisasi	%		
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	7	7,2	102,86	7	102,86

Adapun realisasi indikator kinerja Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Tahun 2019-2023 disajikan dalam grafik berikut ini :

Grafik 3.28.

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023



Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Perkembangan jumlah wisatawan di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.36.

Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Banyumas
Tahun 2019-2023

Uraian	Sat	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kunjungan wisata	org	3.580.743	1.866.157	1.466.580	2.656.579	4.326.420
a. Wisatawan Nusantara	org	3.580.485	1.866.083	1.466.571	2.656.540	4.326.394
b. Wisatawan Mancanegara	org	258	74	9	39	26

Sumber : Dinporabudpar Kab. Banyumas, 2023

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pencapaian Tujuan Menumbuhkan dan Mengembangkan Daya Tarik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sejauh ini pariwisata di Kabupaten Banyumas masih bertumpu pada wisata alam dan buatan, potensi wisata lain seperti kekayaan budaya dan heritage belum tergarap maksimal. Perlu adanya upaya lebih untuk terus meningkatkan kunjungan wisata di Kabupaten Banyumas. Perlu adanya inovasi dalam hal promosi wisata. Pada pelaksanaannya, promosi konvensional harus di barengi dengan promosi digital yang lebih masif, konsisten, dan tepat sasaran. Bentuk promosi harus disesuaikan dengan target pasar masing masing jenis objek wisata sehingga peningkatan kunjungan wisata akan lebih optimal.

Dalam mendukung peningkatan kunjungan wisatawan, potensi lain yang dapat dioptimalkan adalah Ekonomi Kreatif. Kegiatan ekonomi kreatif dilaksanakan pada 17 (tujuh belas) subsektor yaitu : aplikasi, game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film/animasi/video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi/radio. Adapun subsektor Ekonomi Kreatif unggulan Kabupaten Banyumas adalah Seni Pertunjukan, didukung oleh tiga subsektor prioritas yaitu Film, Animasi, dan Video; Kuliner; dan Fotografi.

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Desa Wisata. Pengembangan desa wisata di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2023 sebanyak 21 (dua puluh satu) desa dari 301 desa yang ada.

Pemerintah Kabupaten Banyumas mengembangkan desa wisata yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan. Pada tahun 2023 Dua Desa Wisata (Deswita) yaitu Deswita Pagubugan Melung, Kecamatan Kedungbanteng dan Deswita Karangkemiri Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas meraih prestasi pada Lomba Desa Wisata Nusantara 2023. Lomba Desa Wisata Nusantara 2023 ini, di ikuti seluruh Desa Wisata di seluruh wilayah Indonesia.

Gambar 3.23.

Revitalisasi Kota Lama Banyumas



Sumber : Humas Kab. Banyumas, 2023

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka meningkatkan pariwisata antara lain :

- 1) Melaksanakan sosialisasi, pendampingan dan pelatihan gerakan sadar wisata;
- 2) Mengoptimalkan pemasaran dan promosi pariwisata berbasis teknologi;
- 3) Menyusun kalender event;
- 4) Melakukan kerjasama antar daerah dengan membuat paket wisata antar daerah;
- 5) Menyusun SOP pariwisata dan melengkapi fasilitas serta sarpras pendukung objek wisata;
- 6) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia kepariwisataan melalui pelatihan dan sertifikasi;
- 7) Memaksimalkan paket wisata terintegrasi antar objek wisata maupun antar kawasan wisata;
- 8) Penguatan kelembagaan komekraf (Komite Ekonomi Kreatif) dengan melakukan Reorganisasi Komite Ekonomi Kreatif;
- 9) Pendataan pelaku Ekonomi Kreatif agar pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Banyumas lebih tepat sasaran.

Tercapainya tujuan menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif dengan indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) didukung oleh 8 (delapan) program dengan total anggaran sejumlah Rp. 247.731.665.107,- dan realisasi sebesar Rp. 219.175.216.713,- sehingga rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 88,47%. Dari 8 (delapan) program yang realisasi mencapai lebih dari 80% sebanyak 6 program.

Gambar 3.24.

Penerimaan Penghargaan Lomba Desa Wisata Nusantara (LDWN) 2023 (Desa Melung dan Desa Karangkemiri)



Sumber : Humas Kab. Banyumas, 2023

9. TUJUAN 9 : Meningkatkan Aktualisasi Nilai-nilai Budaya, Agama dan Kebangsaan dalam Kehidupan Masyarakat

Dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Banyumas menetapkan 1 (satu) indikator utama, yaitu angka kriminalitas.

Secara lebih rinci realisasi capaian Angka Kriminalitas adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.37.

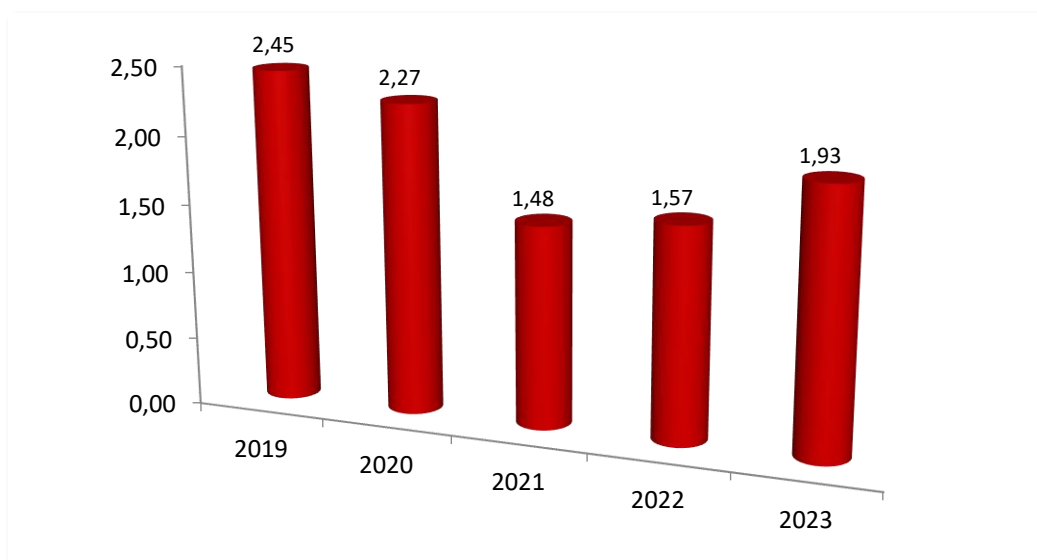
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Aktualisasi Nilai-nilai Budaya, Agama dan Kebangsaan dalam Kehidupan Masyarakat Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023			Target 2023 akhir RPJMD	Persentase Kinerja RPJMD s.d Th 2023
		Target	Realisasi	%		
Angka Kriminalitas	Per 10.000 penduduk	1,516	1,93	72,69	1,516	72,69

Capaian Angka Kriminalitas Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2019-2023 disajikan pada grafik berikut ini :

Grafik 3.29.

Angka Kriminal Kabupaten Banyumas tahun 2019-2023
(per 10.000 Penduduk)



Sumber : E-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Angka kriminalitas menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk melakukan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Kestabilan keamanan diperlukan agar kegiatan usaha yang dilakukan akan berkembang dan memberikan keuntungan bagi investor dan mendatangkan devisa sebagai sumber pendapatan daerah.

Selama tahun 2023 terhitung sejak Januari hingga Desember 2023, Polresta Banyumas mencatat ada 487 kejahatan. Jumlah tersebut

mengalami kenaikan hingga 10 persen, di bandingkan 2022 yang hanya ada 441 kasus. Sedangkan dari total 487 kasus, sebanyak 417 kasus berhasil terselesaikan. Dari data tersebut menyebabkan angka kriminalitas Kabupaten Banyumas untuk Tahun 2023 juga mengalami kenaikan dari 1,57 per 10.000 penduduk menjadi 1,93 per 10.000 penduduk. Meskipun mengalami kenaikan namun kondisi di Kabupaten Banyumas cukup kondusif dan harapannya kondisi ini akan mempengaruhi iklim investasi di Kabupaten Banyumas semakin baik.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Tujuan Meningkatkan Aktualisasi Nilai-nilai Budaya, Agama dan Kebangsaan dalam Kehidupan Masyarakat

Faktor penghambat dalam rangka pencapaian tujuan Meningkatkan Aktualisasi Nilai-nilai Budaya, Agama dan Kebangsaan dalam Kehidupan Masyarakat di Kabupaten Banyumas antara lain :

- 1) Kota Purwokerto merupakan pusat jasa pendidikan di Barlingmascakeb (Banjarnegara-Purbalingga-Banyumas-Cilacap-Kebumen) sehingga banyak orang dari luar kabupaten yang bisa menimbulkan kejahatan;
- 2) Tingginya masyarakat miskin;
- 3) Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama

Dalam rangka menurunkan angka kriminalitas, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan beberapa upaya diantaranya adalah :

- 1) Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang pencegahan kriminalitas dengan mengajak masyarakat untuk mewaspadaai paham-paham radikalisme, menumbuhkan rasa persatuan dan toleransi sesama anak bangsa;
- 2) Melaksanakan kegiatan pembinaan generasi muda dalam upaya menumbuh kembangkan jiwa nasionalisme yang berdasarkan Pancasila melalui pembinaan para anggota Paskibraka, fasilitasi kegiatan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) *go to school*, Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

- 3) Menjaga kondusivitas menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 dengan memfasilitasi kegiatan Parpol dan Ormas dalam Upaya menumbuh kembangkan semangat persatuan bangsa.
- 4) Melaksanakan kegiatan dalam rangka penguatan ekonomi , sosial dan budaya.
- 5) Persatuan ormas-ormas yang ikut berperan dalam menjaga keamanan.

Tercapainya tujuan meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat dengan indikator Angka Kriminalitas didukung oleh 16(enam belas) program dengan total anggaran sejumlah Rp. 313.975.930.661,- dan realisasi sebesar Rp. 273.437.923.135,- sehingga rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 87,09%. Dari 16 (enam belas) program yang realisasi mencapai lebih dari 80% sebanyak 7 (tujuh) program.

Gambar 3.25.

Deklarasi Damai Ormas se-Kabupaten Banyumas



Sumber Humas Kabupaten Banyumas, 2023

B. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Banyumas dianggarkan melalui

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas. Adapun jumlah anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.38.

Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2023 (Sebelum Audit BPK RI)

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	Pendapatan Daerah	3.587.231.980.162	3.360.086.905.966	93,67
1.1	Pendapatan Asli Daerah	870.559.278.394	854.166.421.662	98,12
1.2	Pendapatan Transfer	2.703.317.930.768	2.494.771.851.336	92,29
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	13.354.771.000	11.148.632.968	83,48
2.	Belanja Daerah	3.826.381.167.518	3.356.466.880.094	87,72
2.1	Belanja Operasi	2.867.914.216.042	2.489.837.520.111	86,82
2.2	Belanja Modal	380.971.106.227	309.258.726.963	81,18
2.3	Belanja Tidak Terduga	3.911.665.175	307.894.469	7,87
2.4	Belanja Transfer	573.584.180.074	557.062.738.551	97,12
3.	Pembiayaan Daerah	239.149.187.356	249.180.794.793,84	104,19
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	293.384.971.356	293.384.971.356,84	100,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	54.235.784.000	44.204.176.563	81,50
	Pembiayaan Netto	239.149.187.356	249.180.794.793,84	104,19
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0	252.800.820.665,84	0,00

Sumber : BKAD Kabupaten Banyumas, 2023

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.39.

Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemerintah
Kabupaten Banyumas per tujuan/sasaran strategis Tahun 2023

No	Tujuan	Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase Realisasi Anggaran (%)
1.	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	927.128.633.528	866.331.619.061	93,44

No	Tujuan	Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase Realisasi Anggaran (%)
2.	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	806.341.589.807	726.040.947.402	90,04
3.	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	268.143.959.495	231.560.625.889	86,36
4.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	286.127.950.342	256.383.109.644	89,60
5.	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	243.571.906.287	215.520.144.997	88,48
6.	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	252.879.576.567	223.398.495.988	88,34
7.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	480.479.955.726	434.977.662.970	90,53
8.	Menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif	247.731.665.107	219.175.216.713	88,47
9.	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai	313.975.930.661	273.437.923.135	87,09

No	Tujuan	Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase Realisasi Anggaran (%)
	budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat			
JUMLAH		3.826.381.167.518	3.446.825.745.796	90,08

Sumber : Aplikasi Jegos Kabupaten Banyumas, 2023

1. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Kinerja

Analisis Efisiensi Kinerja adalah analisis yang membandingkan antara capaian kinerja setiap sasaran strategis dengan tingkat penyerapan anggaran pelaksanaan program/ kegiatan perangkat daerah pendukung. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2023, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.40.

Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Tujuan/Sasaran strategis
Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran strategis	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
MISI 1 . Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik					
1.	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik	1	102,53	866.331.619.062	93,44
MISI 2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan					
2.	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	1	101,9	726.040.947.402	90,04
3	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	1	86,09	231.560.625.889	86,36
MISI 3 . Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan					
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan	2	106,94	256.383.109.644	89,60

No	Tujuan/ Sasaran strategis	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
	meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian				
	MISI 4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan				
5	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	1	107,79	215.520.144.997	88,48
	MISI 5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan				
6	Perwujudan kawasan peruntukan industri dan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	3	415,56	223.398.495.988	88,34
	MISI 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan				
7	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	1	87,68	434.977.662.970	90,53
	MISI 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal				
8	Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif	1	102,86	219.175.216.713	88,47
	MISI 8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius				
9	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	1	72,69	273.437.923.135	87,09

Sumber : Bagian Organisasi (diolah), 2023

Dari 12 (dua belas) indikator yang tercapai kinerja sebanyak 8 (delapan) indikator walaupun 4 (empat) indikator tidak tercapai, namun kinerja masih masuk kategori tinggi sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2023 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Banyumas. Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kerjanya mencapai atau lebih

dari 100%. Terlihat mayoritas dari 9 tujuan/sasaran strategis, 6 (enam) tujuan/sasaran strategis sama atau lebih dari 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.41.

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
MISI 1 . Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik					
1.	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik	1	102,53	93,44	8,56
MISI 2 . Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan					
2.	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	1	101,9	90,04	11,86
3	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	1	86,09	86,36	-
MISI 3 . Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan					
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	2	106,94	89,60	17,34
MISI 4 . Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan					
5	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	1	107,79	88,48	19,31
MISI 5 . Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan					
6	Perwujudan kawasan peruntukan industri dan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	3	415,56	88,34	327,22
MISI 6 . Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan					
7	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	1	87,68	90,53	-

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
	MISI 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal				
8	Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif	1	102,86	88,47	14,39
	MISI 8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius				
9	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	1	72,69	87,09	-

Sumber : *Bagian Organisasi (diolah)*, 2023

Berdasarkan data pada tabel tersebut diatas terdapat 6 (enam) tujuan/sasaran strategis memperoleh hasil persentase rata-rata capaian kinerja melebihi realisasi persentase anggaran, sedangkan 3 (tiga) tujuan/sasaran strategis masih kurang efisien.

2. Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Banyumas tahun 2023 telah terumumkan pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah) sebesar Rp. 1.519.983.221.954, yang terdiri dari pagu penyedia sebesar Rp. 987.857.371.303 dan pagu swakelola sebesar Rp. 532.513.566.251 dengan total paket terumumkan sebanyak 16.490 paket. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan melalui beberapa metode pengadaan yaitu *e-purchasing*, *tender* dan *non tender* (pengadaan langsung atau penunjukan langsung).

Tabel 3.42.

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2023

No.	Total Pagu RUP	Pagu Penyedia	Pagu Swakelola	Total Paket
1	1.519.983.221.954	987.857.371.303	532.513.566.251	16.490

Sumber : *Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa (diolah)*, 2023

Dari total pagu penyedia yang terumumkan sebesar Rp. 987.857.371.303, telah dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui 2 (dua) aplikasi yaitu aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) dengan menggunakan metode *tender/non tender/pencatatan* dan aplikasi Katalog Elektronik LKPP dengan menggunakan metode *e-purchasing*. Adapun rincian pengadaan barang/jasa secara elektronik adalah sebagai berikut:

Tabel 3.43.

Pelaksanaan PBJ melalui Elektronik tahun 2023

No.	Metode	Jumlah Paket	Pagu	Realisasi	Efisiensi	
					Rp.	%
1	E-purchasing	14.725	473.405.656.963	306.445.159.810	166.960.497.153	35
2	Tender	139	120.472.295.465	110.182.390.281	10.289.905.184	9
3	Non Tender	932	112.585.909.564	108.293.302.943	4.292.606.622	4
	Total	15.799	706.463.861.992	524.920.853.034	181.543.008.959	

Sumber : Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa (diolah), 2023

Pemerintah Kabupaten Banyumas selalu mendorong perangkat daerah agar dalam pengadaan barang/jasa untuk memprioritaskan pengadaan melalui metode pemilihan *e-purchasing*. Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia dalam Katalog Elektronik maka dilakukan metode pemilihan selain *e-purchasing*. Pada tahun 2023 perangkat daerah di Kabupaten Banyumas telah melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui metode *e-purchasing* sebanyak 14.725 paket dengan nilai total pagu pengadaan sebesar Rp 473.405.656.963, realisasi pengadaan sebesar Rp 306.445.159.810, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 166.960.497.153 atau 35%.

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia barang/jasa (Tender) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas. Tahun 2023, telah dilaksanakan sebanyak 139 paket pekerjaan dengan total pagu pengadaan sebesar Rp 120.472.295.465, realisasi nilai kontrak sebesar Rp 110.182.390.281, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 10.289.905.184 atau 9%.

Untuk pelaksanaan pengadaan non tender (pengadaan langsung atau penunjukan langsung) di Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 telah

dilaksanakan sebanyak 932 paket dengan nilai total pagu pengadaan sebesar Rp. 112.585.909.564 realisasi pengadaan sebesar Rp 108.293.302.943, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 4.292.606.622 atau 4%.

C. PENGHARGAAN TAHUN 2023

Ditengah kesibukan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, Kabupaten Banyumas tetap berprestasi yang dibuktikan dengan berbagai penghargaan. Penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Banyumas sepanjang kurun waktu Tahun 2022, diantaranya :

Tabel 3.44.

Daftar Penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023

No	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan	Penerima
1	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (12 kali berturut-turut)	BPK RI	Pemkab Banyumas
2	Swasti Saba Padapa (Penyelenggaraan Kota Sehat)	Kementerian Kesehatan	Pemkab Banyumas
3	Penghargaan Lomba Desa Wisata Nusantara (LDWN) 2023 (Desa Melung dan Desa Karangemiri)	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)	Desa Melung dan Desa Karangemiri
4	Penghargaan Daerah Tertib Ukur Tahun 2023	Kementerian Perdagangan	Pemkab Banyumas
5	Plakat Adipura untuk TPS3R Terbaik dan Piala Adipura untuk kategori Kabupaten Sedang	Kementerian Lingkungan Hidup	Pemkab Banyumas
6	Penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI	Pemkab Banyumas
7	SAKIP kategori A	Kementerian PAN dan RB	Pemkab Banyumas
8	Kabupaten Kreatif Indonesia 2023	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf)	Pemkab Banyumas
9	Satya Lencana Wira Karya	Presiden Republik Indonesia (RI)	Ir. Achmad Husein (Bupati Banyumas)

No	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan	Penerima
10	Anugerah Revolusi Mental kategori Gerakan Indonesia Bersih	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).	Pemkab Banyumas
11	Adipura	Kementrian LHK	Pemkab Banyumas
12	Anugerah Meritokrasi Tahun 2023	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Pemkab Banyumas
13	Penghargaan Kepatuhan Tinggi Bidang Pelayanan Publik Peringkat ke 7 Nasional	Ombudsman RI	Pemkab Banyumas
14	Evaluasi Pelayanan Publik kategori Pelayanan Prima tertinggi di Jawa Tengah kategori RSUD	Kementerian PAN dan RB	RSUD Ajibarang
15	Evaluasi Pelayanan Publik kategori Sangat Baik	Kementerian PAN dan RB	1. Dinsospermasdes 2. Kecamatan Kembaran
16	Kabupaten/Kota Peduli HAM	Kementerian Hukum dan HAM	Pemkab Banyumas
17	Juara 5 Lomba Hari Habitat Provinsi Tahun 2023	Disperakim Provinsi Jawa Tengah	Dinperkim
18	Kabupaten / Kota Layak Huni se-Provinsi Jawa Tengah	Disperakim Provinsi Jawa Tengah	Dinperkim
19	Penghargaan kategori Kinerja Pengawasan Pemerintah Daerah terbaik	Provinsi Jawa Tengah	Pemkab Banyumas
20	Keterbukaan Informasi Publik kategori Informatif dengan Nilai 98,92	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Dinkominfo

BAB IV PENUTUP

Kabupaten Banyumas mencapai sejumlah pencapaian kinerja ekonomi dan kesejahteraan yang positif pada tahun 2023. **Pertama**, Persentase Kemiskinan pada tahun tersebut menurun menjadi **12,53%**, dibandingkan dengan **12,84%** pada tahun 2022. Kabupaten Banyumas berhasil mempertahankan tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten sekitar, seperti Kabupaten Purbalingga (**14,99%**), Kabupaten Banjarnegara (**14,90%**), dan Kabupaten Kebumen (**16,34%**).

Kedua, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2023 mencapai **6,35%**, mengalami sedikit peningkatan dari **6,05%** pada tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan kondisi ekonomi global akibat Pandemi Covid-19 masih terus berlanjut di tahun 2023. Aktivitas usaha belum sepenuhnya pulih, sedangkan angkatan kerja makin meningkat, sehingga menaikkan angka TPT.

Ketiga, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyumas menunjukkan pertumbuhan yang positif secara konsisten. Dari tahun 2019 hingga 2023, IPM meningkat dari **71,96** poin menjadi **73,96** poin, dengan pertumbuhan rata-rata 0,40 poin per tahun. Capaian ini melampaui indeks IPM Kabupaten sekitar, seperti Kabupaten Cilacap (**7,39**), Kabupaten Purbalingga (**7,34**), Kabupaten Banjarnegara (**6,86**), dan Kabupaten Kebumen (**7,86**). Pencapaian ini mencerminkan komitmen dan upaya Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD 2018-2023, disimpulkan bahwa dari 8 (delapan) Misi, 9 (sembilan) Tujuan, dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja, rata-rata tercapai sebesar **176,84%**, atau dikategorikan sebagai "**Sangat Tinggi**". Analisis terperinci menunjukkan bahwa dari 12 indikator kinerja, 8 (delapan) di antaranya tercapai dengan "**Sangat Tinggi**" (capaian di atas 100%), sementara 4 (empat) indikator lainnya belum mencapai target yang ditetapkan (capaian di bawah 100%).

Hasil pengukuran kinerja terhadap 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

Tujuan/Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
TUJUAN 1						
Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	75	76,9	102,53	Sangat Tinggi
TUJUAN 2						
Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat						
2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,58	73,96	101,9	Sangat Tinggi
TUJUAN 3						
Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan						
3.	Persentase penduduk miskin	%	11	12,53	86,09	Tinggi
TUJUAN 4						
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian						
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5	5,4	108	Sangat Tinggi
5.	PDRB per Kapita	Juta rupiah	35,513	37,6	105,88	Sangat Tinggi
TUJUAN 5						
Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis						
6.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	74,04	79,81	107,79	Sangat Tinggi
TUJUAN 6						
Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja						
7.	Persentase pertumbuhan nilai investasi daerah	%	2	21,72	1.086	Sangat Tinggi
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,5	6,35	58,89	Rendah
9.	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Indeks	64,15	65,3	101,79	Sangat Tinggi
TUJUAN 7						
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat						
10.	Persentase Kinerja Infrastruktur	%	78,87	69,15	87,68	Tinggi
TUJUAN 8						
Menumbuhkan dan mengembangkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif						
11.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	7	7,2	102,86	Sangat Tinggi
TUJUAN 9						
Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat						

12.	Angka Kriminalitas	Per 10.000 penduduk	1,516	1,93	72,69	Sedang
RATA-RATA CAPAIAN					176,84	Sangat Tinggi

Sumber : E-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2023 sebesar **176,84%** dengan predikat Sangat Tinggi.
2. 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama mendapat predikat kinerja "**Sangat Tinggi**".
3. 2 (dua) Indikator Kinerja Utama mendapat predikat "**Tinggi**".
4. 1 (satu) Indikator Kinerja Utama mendapat predikat kinerja "**Sedang**".
5. 1 (satu) Indikator Kinerja Utama mendapat predikat kinerja "**Rendah**".